PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)

SKRIPSI

Oleh

ANNIDA IZZATUL ISLAMIYAH
NIM : 17520100

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh

ANNIDA IZZATUL ISLAMIYAH
NIM : 17520100

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)

SKRIPSI

Oleh

ANNIDA IZZATUL ISLAMIYAH

NIM : 17520100

Telah disetujui pada tanggal 10 Desember 2021

Dosen Pembimbing,

Sulis Rochayatun, M.Akun.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA
NIP 19760313 201802012188

Mengetahui :

Ketua Jurusan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, M.Bus.,Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D
NIP 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)

SKRIPSI

Oleh
ANNIDA IZZATUL ISLAMIYAH
NIM : 17520100

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada tanggal 14 Januari 2022

Panitia Ujian	Tanda Tangan
Ketua Penguji **Fajar Nurdin,M.Ak** **NIP : 198310052019031006**	( )
Dosen Pembimbing / Sekertaris Sidang **Sulis Rochayatun, M.Akun.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA** **NIP : 197603132018020121 88**	( )
Penguji Utama **Hj.Nina Dwi Setianingsih,SE.,M.S.A** **NIP : 197510302016082012048**	( )

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, M.Bus.,Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D
NIP 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Annida Izzaul Islamiyah
NIM	: 17520100
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi / Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019) adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Desember 2021

Hormat saya,

Annida Izzatul Islamiyah
NIM : 17520100

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudaham”

(QS : Al-Insyirah : 5)

No matter who you are, where you are from, your skin colour, gender identity, just speak yourself.

(Kim Nam Joon)

KAT A PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan ataupun informasi, terutama untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan penelitian-penelitian baru yang dikembangkan. Penulis menyadari banya dalam penyususnan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan pemikirannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC.,M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, M.Bus.,Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, serta bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua saya tercinta serta adik-adik yang saya sayangi Anggit Hizbul Islam, Dafa Syakhwatul Islam, dan Fairel Aflahul Islam yang telah menjadi support system terbesar serta menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluruh teman-teman seperjuangan saya jurusan akuntasi tahun 2017 yang telah memberikan banyak kesan indah dan tidak terlupakan dalam menempuh ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Serta kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu, doa dan semua yang telah di berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat dilakukan lebih baik lagi pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga penelitan ini dapat membeikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

Malang, 10 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL……..…….i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO v
KAT A PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
BAB II.. 10
KAJIAN PUSTAKA 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Kajian Teoritis 15
2.2.1 Pajak Penghasilan 15
2.2.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 25
2.1.1 Struktur Modal 26
2.2.4 Profitabilitas 30
2.2.5 Likuiditas 33
2.2.6 Integrasi Islam 34

2.3 Kerangka Konseptual 38
2.4 Hipotesis Penelitian 39
BAB III 43
METODE PENELITIAN 43
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 43
3.2 Lokasi Penelitian 43
3.3 Populasi dan Sampel 44
3.4 Teknik Penarikan Sampel 44
3.5 Data dan Jenis Data 47
3.6 Teknik Pengumpulan Data 48
3.7 Definisi Operasional Variabel 48
3.8 Analisis Data 51
3.8.1 Uji Statistik Deskriptif 51
3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 51
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 52
3.8.4 Uji Hipotesis 54
BAB IV 56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
4.1 Hasil Penelitian 56
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 56
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 73
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 75
4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda 80
4.1.5 Uji Hipotesis 83
4.2 Pembahasan Penelitian 86
4.2.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap *Tax Avoidance* 86
4.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* 87
4.2.3 Pengaruh Likuiditas *Terhadap Tax Avoidance* 88

BAB V 90
PENUTUP 90
5.1 Kesimpulan..... 90
5.2 Saran..... 91
DAFTAR PUSTAKA..... 92
LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 1
Table 2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu 11
Tabel 3. 1 Pemilihan Sampel 45
Tabel 3. 2 Daftar Sampel 46
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel 49
Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif 73
Tabel 4. 2 Uji Multikolinieritas 78
Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson 80
Tabel 4. 4 Analisis Regresi Linier Berganda 81
Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi (R2) 83
Tabel 4. 6 Uji F Statistik 84
Tabel 4. 7 Uji T Statistik 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 38
Gambar 4. 1 Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram 76
Gambar 4. 2 Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot..... 77
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplots 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Sampel
Lampiran 2	: Hasil Perhitungan Variabel Dependen
Lampiran 3	: Hasil Perhitungan Variabel Independen
Lampiran 4	: Data Variabel Independen
Lampiran 5	: Hasil Output SPSS
Lampiran 6	: Biodata Penulis
Lampiran 7	: Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Annida Izzatul Islamiyah, 2021, SKRIPSI. Judul : "Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance" (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019).

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA

Kata kunci : Struktur Modal, Profitabilitas, Likuidittas, Tax Avoidance

Pajak menjadi salah satu kewajiban yang harus dibayarkan bagi perusahaan sehingga terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan bagi perusahaan tentu menginginkan bahwa kewajiban pajak yang dikeluarkan sekecil mungkin memalui berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal dan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis dan pengujian data berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id dengan populasi perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah data sebanyak 185, kemudian dianalisis dengan bantuan program SPSS melalui teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tax avoidance dipengaruhi oleh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas sebesar 17,5% sedangkan sebesar 82,5% tax avoidance dipengaruhi variabel lain. Selain itu, secara parsial struktur modal dengan variabel DAR yang memiliki nilai t hitung 0,227 lebih keci dari t tabel 1,973 serta variabel DER yang memiliki nilai t hitung 0,0,540 lebih keci dari t tabel 1,973 serta likuiditas dengan variabel *current ratio* yang memiliki nilai t hitung 0,46 lebih kecil dari t tabel 1,973 menunjukan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas dengan variabel NPM yang memiliki nilai t hitung -5,463 menunjukan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, secara simultas variabel struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

ABSTRACT

Annida Izzatul Islamiyah, 2021, *THESIS*. Title : "*The Effect of Capital Structure, Profitability, Liquidity on Tax Avoidance" (Study on Manufacturing Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2015-2019).*

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA

Key Word : *Capital Structure, Profitability, Liquidity, Tax Avoidance*

Tax is one of the obligation that must be paid for companies, so that there is a difference of interest between the government who wants taxpayers to pay their obligation in accordance with the provisions stipulated in the law, while companies certainly want that the tax obligations are as small as possible with various efforts made by the company, including tax avoidance legally and does not violate the regulations set by the government.

This research use a quantitative approach with analysis and testing of financial reports obtained from the official website of the IDX, namely www.idx.co.id with a population of companies, namely manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 period. The sampling technique used purposive sampling method with a total of 185 data, then analyzed with the help of the SPSS program through descriptive statistical analysis techniques, multiple linear regression analysis, classical assumption test, and hypothesis testing.

The results of this research indicate that tax avoidance is influenced by capital structure, profitability, and liquidity by 17.5%, while 82.5% tax avoidance is influenced by other variables. In addition, partially the capital structure with the DAR variable which has a t-count value of 0.227 smaller than the t-table 1.973 and the DER variable which has a t-count value of 0.5040 smaller than the t-table 1.973 and liquidity with the current ratio variable which has a t-count value of 0.46 smaller than t table 1.973 shows no effect on tax avoidance, while profitability with the NPM variable which has a t value of -5.463 shows a negative effect on tax avoidance. In addition, simultaneously the variables of capital structure, profitability, and liquidity have a positive and significant effect on tax avoidance.

المستخلص

/نيدا عزت الإسلامية 2021 ، أطروحة. العنوان: "تأثير هيكل رأس المال والربحية والسيولة على التهرب الضريبي" (دراسة حول شركات قطاع الصناعة التحويلية المدرجة في بورصة إندونيسيا (2015-2019).

المشرف: سوليس روشاياتون

الكلمة المفتاحية: هيكل رأس المال ، الربحية ، السيولة ، التهرب الضريبي

الضرائب هي أحد الالتزامات التي يجب دفعها للشركات بحيث يكون هناك اختلافات في المصالح بين الحكومة التي تريد من دافعي الضرائب سداد التزاماتهم وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون ، بينما تريد الشركات بالتأكيد أن تكون الالتزامات الضريبية الصادرة مثل صغيرة قدر الإمكان من خلال الجهود المختلفة التي الشركة ، بما في ذلك من خلال التهرب الضريبي بشكل قانوني ولا ينتهك اللوائح التي وضعتها الحكومة. عند تنفيذ جهود التهرب الضريبي يمكن أن تتأثر بعدة عوامل بما في ذلك حالة هيكل رأس المال وربحية وسيولة الشركة ، وبالتالي فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تأثير هيكل رأس المال والربحية والسيولة على التهرب الضريبي

تستخدم هذه الدراسة نهجًا كميًا من خلال تحليل واختبار البيانات في شكل بيانات مالية تم الحصول عليها من مع كون عدد الشركة عبارة عن شركات تصنيع مدرجة في www.idx.co.id الموقع الرسمي ، وبالتحديد .بورصة إندونيسيا. استخدمت تقنية أخذ العينات طريقة أخذ العينات هادفة من خلال معايير مختلفة ثم تحليلها

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التهرب الضريبي يتأثر بهيكل رأس المال والربحية والسيولة بنسبة 17.5٪ ، بينما 82.5٪ يتأثر التهرب الضريبي بمتغيرات أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، لا يؤثر هيكل رأس المال والسيولة جزئيًا على التهرب الضريبي ، في حين أن الربحية لها تأثير سلبي على التهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن .متغيرات هيكل رأس المال والربحية والسيولة في نفس الوقت لها تأثير إيجابي وهام على التهرب الضريبي

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pemerintahan negara memerlukan berbagai macam unsur pendukung untuk mewujudkan tujuan negara, yang meliputi : Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan Perundang-undangan, Program-program kerja, maupun penerimaan negara baik yang berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah (Mustaqiem, 2014). Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang berasal dari kontribusi wajib pajak terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan, dimana penggunaan uang pajak tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (DJP, 2013).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)								
	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PPh	855,13	651,44	76,18%	894,45	668,61	74,75%	670,38	593,85	88,58%
-Migas	38,13	59,77	156,70%	66,15	52,89	74,34%	31,86	33,18	104.1%
-Non Migas	817	591,67	72,42%	828,29	615,72	79,95%	638,52	560,67	87,81%
PPnBM	541,8	459,91	84,89%	655,39	441,18	67,32%	507,52	448,39	88,35%
PBB	27,06	25,3	93,51%	19,1	20,4	106,70%	13,44	20,95	155,88%
Pajak lainnya				8,61	5,97	69,38%	7,19	6,78	90,59
Jumlah	**1.424,00**	**1.136,66**	**79,82%**	**1577,56**	**1.136,17**	**72,02%**	**925,34**	**925,34**	**89,25%**

(Sumber data : Kemenkeu.go.id-data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dilihat dari besarnya penerimaan negara, penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan selama tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi penerimaan negara yang paling tinggi. Pajak penghasilan merupakan bagian dari pajak pusat yang dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, dimana wajib pajak badan menjadi salah satu subjek pajak yang kewajiban pajaknya dimulai saat badan tersebut didirikan, bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang menghasilkan penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tariff PPh badan, maka akan meghasilkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Mustaqiem, 2014).

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari besarnya presentase atas realisasi penerimaan pajak yang diperoleh, menunjukan bahwa penerimaan pajak di Indonesia secara berturut-turut berada dibawah angka 100% hal ini menunjukan bahwa penerimaan pajak yang dihasilkan tidak mencapai target yang ditetapkan, banyak perusahaan yang melakukan praktik untuk meminimalisir kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptoni, mengatakan, tax avoidance menjadi alternatif bagi perusahaan karena bersifat legal. Di balik SPT PPh badan yg dilapor, realitanya banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT tersebut (Kontan.co.id).

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan wajib pajak badan memiliki ruang untuk mengecilkan penghasilan dengan memanfaatkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dimana perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan ke tahun berikutnya, khususnya untuk transaksi akhir tahun. Jadi, perusahaan menerapkan

creative accounting dan *legal planning* supaya pendapatan diakui di tahun berikutnya. (Bisnis.com)

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan pajak secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara, sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai principal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam upaya mengurangi beban pajak, pihak manajemen dapat melakukan berbagai cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance)* yang merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak (Damayanti & Susanto, 2015).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. *Tax avoidance* didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara serta memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak dan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017).

Perusahaan dalam usaha memperoleh laba yang optimal antara lain bertujuan untuk meningkatkan nilai ataupun profitabilitas perusahaan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para investor atau pemegang saham. Salah satu metode yang dapat digunakan antara lain dengan menggunakan beban bunga atas hutang yang merupakan biaya usaha yang dapat dijadikan sebagai aspek pengurang penghasilan, hal ini akan berdampak pada laba perusahaan semakin berkurang sehinnga akan berdampak terhadap jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh perusahaan yang semakin berkurang (Salamah., Pamungkas., & Yogi. K, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak ditentukan dari hasil laba kotor kemudian dikurangkan atas biaya langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan tersebut. Untuk penghitungan PPh Pasal 25/29 terutang untuk wajib pajak badan dengan cara laba bersih fiskal dikalikan dengan tarif PPh yang telah ditetapkan.

Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal menggambarkan seluruh pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan jangka panjang atau tingkat hutang tertentu yang digunakan untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan modal perusahaan (Laksono, 2019). Kemampuan perusahaan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh seberapa baik struktur modal perusahaan, dimana kokohnya struktur modal menjelaskan tingginya kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan bisnisnya, dengan optimalisasi tersebut dimungkinkan sumber penghasilan perusahaan banyak dan jumlahnya besar (Hamdi, 2018).

Dalam teori trade off *(trade-off theory)* perusahaan akan memperoleh perlindungan pajak yang berasal dari potensi kebangkrutan yang disebabkan oleh pembiayaan utang, hal ini dinyatakan oleh (Brigham & Houston, 2019) *"The*

preceding arguments led to the development of what is called "the trade-off theory of leverage." This theory states that firms trade off the tax benefits of debt financing against problems caused by potential bankruptcy". Selain itu dijelaskan penggunaan hutang yang lebih banyak dapat memberikan manfaat terhadap perlindungan pajak yang berasal dari bunga yang menjadi pengurang penghasilan karena dijadikan sebagai biaya, hal ini tertuang dalam tulisannya berupa *"The fact that interest paid is a deductible expense makes debt less expensive than common or preferred stock. In effect, the government pays part of the cost of debt—or to put it another way, debt provides tax shelter benefits. As a result, using more debt reduces taxes and thus allows more of the firm's operating income (EBIT) to flow through to investors"*

Pembiayaan suatu perusahaan yang berasal dari hutang ditunjukan dengan rasio leverage yang merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak Badan (Handayani, 2017). Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan akibat dari adanya pos biaya tambahan berupa bunga yang mengurangi laba kena pajak perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak penghasilan yang dapat menurunkan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perushaan, dimana hasil penelitian yang dilakukan (Ariawan & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa hasil analisis regresi linier berganda pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, diperoleh p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ memiliki arti bahwa leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh perusahaan dihitung dari laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dari aktivitas normal perusahaan. Rasio ini

bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba selama periode tertentu. Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang berkaitan dengan total aktiva maupun modal serta penjualan. Berdasarkan ukuran profitabilitas, dapat diprediksi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, tidak akan taat pada pembayaran pajak perusahaan untuk mempertahankan aset perusahaan (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jamaludin, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas dengan menggunakan variabel *Return on Assets* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi, sehingga pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Indradi, 2018). Kaitannya dengan pa jak, dimana likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersbut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Margie & Habibah, 2021) Penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa likuiditas

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas yang bernilai positif artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Margie & Habibah, 2021) menyatakan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kemungkinan bahwa perusahaan menjaga tingkat likuiditas pada tingkatan tertentu sehingga tidak ditemukannya pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak perusahaan-perusahaan mereka, karena likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur akan dianggap kurang produktif. Tapi jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan bisa berakibat pinjaman modal oleh para kreditur menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten dengan adanya variabel yang berpengaruh positif dan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan variabel berupa struktur modal yang berkaitan dengan rasio *leverage* berupa *debt to equity ratio* dan *debt to asset ratio*, profitabilitas yang menggunakan variabel *net profit margin*, serta likuiditas yang menggunakan variabel *current ratio*. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan alasan karena pajak penghasilan terutang yang menjadi kewajiban setiap badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk pada perusahaan *go public*, serta adanya perbedaan kepentingan antara fiskus yang menghendaki pajak yang menjadi kewajiban perusahaan dibayarkan semaksimal mungkin sedangkan bagi perusahaan menghendaki bahwa pajak yang dikeluarkan itu sekecil mungkin.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

Alasan penulis memilih Perusahaan Sektor Industri adalah dengan pertimbangan bahwa sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bergerak di bidang manufaktur yang memiliki berbagai sub sektor industri sehingga memungkinkan sampel yang diperoleh menjadi lebih banyak dan diharapkan dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu alasan perusahaan industri manufaktur dijadikan sebagai objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Pemerintah semakin fokus menggenjot kinerja industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis yang telah dijalankan guna meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat strukturnya. (https://kemenperin.go.id/). Berdasarkan latar belakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE" (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh struktur modal dengan *Debt to Assets Ratio* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh struktur modal dengan *Debt to Equity Ratio* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas dengan *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan?
4. Apakah terdapat pengaruh likuiditas dengan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan?

5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari struktur modal dengan *Debt to Assets Ratio* dan *Debt to Eqquity Ratio*, Profitabilitas dengan *Net Profit Margin* dan Likuiditas dengan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusunlah tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh struktur modal dengan *Debt to Assets Ratio* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh struktur modal dengan *Debt to Equity Ratio* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas dengan *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh likuiditas dengan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari struktur modal dengan *Debt to Assets Ratio* dan *Debt to Eqquity Ratio*, Profitabilitas dengan *Net Profit Margin* dan Likuiditas dengan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penelitian mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* di suatu perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* di suatu perusahaan dapat menambah wawasan peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai suatu referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan suatu keputusan yang tepat untuk melangsungkan kegiatan usahanya, terutama dalam menentukan struktur modal yang tepat, mampu menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang maksimal serta mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki perusahaan.
4. Bagi investor, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta menjadikan penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan investasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) terutang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan metode dan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang akan dibahas agar penelitian dapat ditujukan pada variabel-variabel yang digunakan. Salah satu data pendukung yang dibutuhkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai acuan yang bersumber dari penelitian terdahulu yaitu data yang memiliki topic yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut :

Table 2.1

Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Fitri Damayanti, Fitri Damayanti, 2015, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance.*	1. Komite Audit 2. Kualitas Audit 3. Kepemilikan Institusional 4. Risiko Perusahaan 5. *Return On Assets*	Uji Statistik T	Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance,* sedangkan risiko perusahaan dan ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

2.	Komang Subagiastraa, I Putu Edy Arizonab, I Nyoman Kusuma, 2016, Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak	1. *Return on Asset* 2. Kepemilikan keluarga 3. Kepemilikan Institusional 4. Proporsi dewan komisaris independen 5. Komite audit 6. Kualitas audit	Analisis regresi linier berganda	*Return on Asset*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen *b*erpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan keluarga, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh sgnifikan terhadap Penghindaran Pajak.
3.	Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan**,** 2016, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*	1. Ukuran Perusahaan 2. Umur perusahaan *3. Return on Asset* *4. Leverage* 5. Pertumbuhan penjualan	Analisis regresi linier berganda	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
4.	I Made Agus Riko Ariawan, Putu Ery Setiawan, 2017, Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan	1. Dewan komisaris Independen 2. Kepemilikan Institusional 3. *Profitabilitas* 4. *Leverage*	Analisis regresi linier berganda	Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

	Leverage Terhadap *Tax Avoidance*			
5.	Rini Handayani, 2017, Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	1. *Return on Asset* 2. *Leverage* 3. Ukuran perusahaan	Analisis regresi linier berganda	Secara parsial variabel *Return on Asset, leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
6.	Donny Indradi, 2018, Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak.	1. Likuiditas 2. *Capital Intensity*	Analisis regresi linier berganda	Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7.	Indah Rahmadini, Nita Erika Ariani, 2019, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017	1. Profitabilitas 2. *Leverage* 3. Kepemilikan institusional 4. Komisaris independen 5. Kepemilikan manjerial 6. Komite audit	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.
8.	Ari Wahyu Leksono, Setya	1. Ukuran perusahaan	Analisis regresi	Ukuran perusahaan dan Profitabilitas

	Stanto Albertus, Rendika Vhalery, 2019, Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2013–2017	2. Profitabilitas	linier berganda	berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
9.	Ali Jamaludin,2020, Pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage* (LTDER), dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017.	*1. Return on Asset* *2. Long Term Debt to Equity Ratio* 3. *Capital Intensity*	Uji statistik T	*Return on assets* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance.* *Long Term Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Intensitas Aktiva tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
10.	Lyandra Aisyah Margie, Habibah, 2021, Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak.	1. Likuiditas *2. Leverage* 3. Struktur kepemilikan 4. Profitabilitas	Uji statistik T	Likuiditas, *laverage*, struktur kepemilikan, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak

Sumber : data diolah, 2021

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel terikat yang digunakan yaitu bagian dari perencanaan pajak berupa penghindaran pajak atau dikenal dengan istilah *tax avoidance* yang diperngaruhi oleh beberapa variabel bebas, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dalam nenentukan variabel bebas dimana dalam penelitian ini variabel yang digunakan berupa struktur modal denga menggunakan dua pengukuran yaitu *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*, variable profitabilitas dengan menggunakan pengukuran *net profit margin,* dan variabel likuiditas dengan mengguakan pengukuran *crurrent ratio.* Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan sektor industry manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sehinnga penelitian ini menggunakan tahun terkini dengan periode 5 tahun.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang ekonomi, pajak menunjukan beralihnya sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Dengan kata lain pajak menyebabkan kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi kepentingan pribadi berkurang, sedangkan kemampuan Negara untuk menyediakan barang dan jasa umum bertambah (Karmila, 2008).

Berdasarkan pengertian pajak diatas, maka dapat diuraikan sifat-sifat dari pajak sebagai berikut :

1. Dapat dipaksakan

   Salah satu yang membedakan pajak dengan pungutan lainnya adalah sifat "memaksa". Artinya, bagi pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo akan dikenai sanksi. Di Indonesia, kewenangan pemerintah untuk memaksakan pajak diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak dengan surat paksa. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo, akan dilakukan tindakan penagihan pajak dari yang paling ringan sampai yang paling berat, seperti penerbitan surat teguran atau surat peringatan, pemberitahuan surat paksa, penyitaan barang penanggung pajak, pelelangan barang sitaaan pajak.

2. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang

   Sifat pajak yang sangat penting adalah bahwa pajak harus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Adanya undang-undang yang mengatur pajak akan memudahkan dalam pemungutan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi penanggung pajak.

3. Pajak tidak memberikan balas jasa langsung

   Salah satu unsur pajak adalah tidak mendapat balas jasa atau manfaat secara langsung, sebab jika pemerintah memberikan balas jasa secara langsung, mereka yang membayar pajak lebih besar akan menuntut balas jasa atau fasilitas yang lebih besar. Walaupun membayar pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung, buka berarti uang pajak dapt digunakan semena-mena oleh pemerintah. Pemerintah hars secara terbuka bertanggung jawab melaporkan penggunaan pajak kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin rela dan sadar dalam membayar pajak.

4. Pajak akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum

   Pajak yang dipungut akan digunakan Negara untuk menjalankan berbagai fungsinya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kewajiban pajak pada seseorang muncul ketika yang bersangkutan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Syarat subjektif dan objektif ini telah

diatur dalam undang-undang perpajakan, selain itu wajib pajak juga dituntut untuk menghitung, menyetor dan melapor pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada (Waskito, 2011)

2.1.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah pihak yang menjadi sasaran undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak baik pribadi atau badan (Sumarsan, 2017). Subjek pajak dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Orang Pribadi

   Orang pribadi yang ditetapkan sebagai subjek pajak baik yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang Belum Terbagi

   Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris, adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

   Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari waji pajak orang pribadi yang meninggalkan warisa tersebut.

3. Badan

   Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak nertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang meliputi:

a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen eloektronik , atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.1.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan (Salman, 2017).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis keapada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang.

2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan seperti hadiah tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Adapun penghargaan yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu
3. Laba usaha, yaitu selisih lebih antara penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban usaha. Untuk memperoleh penghasilan netto fiskal maka atas penjualan perusahaan harus dikurangi dengan penjualan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, demikian juga beban usaha yang merupakan beban untuk menagih dan memperoleh penjualan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final harus dikurangi, dan dikurangi beban yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan dalam perhitungan penghasilan netto.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
   a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
   b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Maksudnya penjualan harta terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan keuntungan daari penjuala tersebut adalah harga pasar;
   c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
   d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan atara pihak-pihak yag bersangkutan;

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung penghasilan kena pajak merupakan objek pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Deviden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Yang termasuk kedalam pengertian deviden adalah:
   1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
   2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
   3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
   4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
   5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu akibat dari pengecilan modal dasar (statute) yang dilakukan secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang diterima pemegang polis;
11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perushaan.

8. Royalti, menurut Undang-Undang PPh royalty adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :
   a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak serupa lainnya;
   b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, ilmiah;
   c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
   d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :

a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa;
b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa;
c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.

e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual / industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang dimaksud dengan sewa adalah imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, seperti sewa mobil, sewa alat berat, sewa kantor, sewa rumah, sewa gudang.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan seumur hidup yang dibayar berulang-ulang dalam waktu tertentu.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukersa), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untu

perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek Pajak.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, keuntungan ini dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, wajib pajak tidak lagi menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melainkan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
14. Premi asuransi, perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Tambahan kekayaan netto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak. Jika diketahui adanya tambahan kekayaan netto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan netto tersebut merupakan penghasilan.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah dimana kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasa filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.

18. Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.2.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Kepatuhan wajib pajak sangat perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia. Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan hingga melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta hak perpajakannya. Sikap wajib pajak terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak yang akan berujung pada tindakan penghindaran pajak (Subagiastraa, Arizonab, Kusuma, & Mahaputra, 2016). Penghindaran pajak (*tax avoidace*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Handayani, 2017).

Penghindran pajak *(tax avoidance)* merupakan kegiatan pengaturan untuk menentukan transaksi yang akan dijalankan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan beban pajak beserta berapa besar pajak yang dikenakan atas transaksi tersebut (Rahmadini & Ariani, 2019). Adapun pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *(Effective Tax Rate)* dimana Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. *Effetictive tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitunggan

tarif pajak pada perusahaan. Dari definisi tersebut *effective tax rate* (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh (Indradi, 2018). Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran *effective tax rate* (ETR) adalah :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \text{ X } 100$$

2.1.1 Struktur Modal

2.2.3.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur modal perusahaan adalah campuran atau proporsi antara utang jangka panjang dan ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya (*operating assets*). Kewajiban perusahaan terhadap utang jangka panjang yaitu membayar bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo secara berkala. Hak dari pemberi pinjaman (kreditur) harus lebih didahulukan dibandingkan dengan para pemegang saham (Raharjaputra, 2009). Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal dan harga pasar saham perusahaan. (Laksono, 2019).

Kebijakan keuangan bentuk utang merupakan kebijakan yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan, kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan pengembalian. Penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, namun penggunaan utang yang lebih besar biasanya menyebabkan terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi. Tujuan pokok manajemen dalam struktur modal adalah menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan berusaha

mencapai suatu tingkat struktur modal yang optimal dengan risiko paling kecil dan meningkatkan nilai perusahaan (Aisjah, 2012)

2.2.3.2 Komponen Struktur Modal

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri (Warsono, 2003) Komponen tersebut akan diuraiakan sebagai berikut :

a. Hutang Jangka Panjang *(Long Term Debt)*

Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

b. Modal Sendiri *(Equity)*

Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada dua sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagai mana dijelaskan sebagai berikut :

a. Modal saham preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan dari pada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b. Modal saham biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa terkadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset telah dipenuhi.

2.2.3.3 Teori Struktur Modal

Perusahaan akan senantiasa berusaha mencapai suatu tingkat struktur modal yang optimal, ada beberapa teori struktur modal yang dikemukakan oleh Brigman dan Daves, (2004) yaitu :

1. *Modigliani & Miller Theory* (MM), menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan kata lain bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan membiayai operasinya. Studi MM ini didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain :
   a. Tidak ada biaya broker;
   b. Tidak ada pajak;
   c. Tidak ada biaya kebangkrutan;
   d. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan;
   e. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan dimasa mendatang;
   f. Laba sebelum bunga dan pajak tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang..

   Pada tahun 1963, MM melakukan penelitian lanjutan dengan melemahkan asumsi tidak adanya pajak perseroan. MM berpendapat bahwa bila ada pajak penghasilan perusahaan maka penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak *(tak deductible expense).* pendapat MM belum memperhatikan finansial distress dan agency cost, sehingga muncul teori *Static Trade-off*.

2. *Static Trade-off Theory*, menunjukan adanya keseimbangan antara manfaat penghematan pajak melalui pendanaan utang dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi akibat penggunaan utang. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. Namun demikian penggunaan utang yang terlalu tinggi akan menghadapi bahaya kebangkrutan dan biaya agensi yang tinggi. Menurut teori ini tingkat struktur modal yang optimal yaitu tingkat penggunaan utang yang dapat menyeimbangkan antara manfaat penghematan pajak dan biaya kebangkrutan sehingga akan dihasilkan harga saham yang maksimum yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.
3. *Pecking Order Theory*, menunjukan bahwa manajer dalam menetukan sumber pembiayaan perusahaan bersumber dari internal terlebih dahulu (laba ditahan), berikutnya menggunakan utang dan terakhir menerbitkan saham baru. Sebab harga saham tersebut sebagai proses penilaian. Konsistensi *pecking-order theory* yaitu menggunakan *cash flows* untuk membayar utang sebelum membayar deviden dan pembelian kembali saham. Apabila cash flow tidak efisien dapat melakukan pinjaman sebelum penawaran ekuitas. Penggunaan dana yang dilakukan perusahaan berdasarkan prioritas pertama berasal dari laba ditahan kemudian utang dan penjualan saham baru, dimana penerbitan surat utang adalah cara terbaik. Hal ini dapat dipahami karena para pemodal akan melihat bahw penawaran saham baru sebagai sinyal yang buruk, sehingga harga saham tersebut akan turun bila saham baru tersebut diterbitkan, dengan demikian biaya modal sendiri menjadi tinggi dan nilai perusahaan cenderung menurun.

2.2.3.4 Pengukuran Struktur Modal

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi financial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki sendiri yang bersumber dari utang jangka panjang *(longterm liabilities)* dan modal sendiri *(shareholder's equity)* yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan (Fahmi, 2014). Terdapat dua

rasio untuk menganalisis struktur modal bagi suatu perusahaan (Kasmir, 2012). Kedua rasio tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

   Debt to Asset Ratio (DAR) adalah suatu rasio perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, yang biasa disebut sebagai rasio hutang (*Debt Ratio*) mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Untuk menghitung *debt to asset ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

   Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio perbandingan total hutang dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit disbanding dengan hutangnya. Utuk menghitung *debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal sendiri}}$$

2.2.4 Profitabilitas

2.2.4.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Ukuran Perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan besar akan menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari utang dengan tujuan untuk kegiatan ekspansi perusahaan. Perusahaan besar dianggap lebih mudah memperoleh tambahan dana di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki kemudahan akses dan ini berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar

pula kebutuhan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana yang dapat berassal dari utang. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan dapat mencerminkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut dan harga saham pun akan menjadi meningkat kemudian nilai perusahaan pun akan menjadi tinggi (Intan & Sudiartha, 2017).

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan pendapatan pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas disebutkan dalam bentuk angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi dasar ukuran bagi kesehatan perusahaan. Dalam perhitungan rasio profitabilitas, semakin tinggi nilainya berarti perusahaan berjalan dengan baik dan efisien dalam menghasilkan laba, pendapatan, dan arus kas. Dengan kata lain, rasio profitabilitas digunakan untuk menilai apakah perusahaan menghasilkan laba yang cukup dari aset dan ekuitas (Laksono, 2019).

2.2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Selain bermanfaat bagi perusahaan, rasio profitabilitas juga dapat berguna bagi pihak diluar perusahaan. Dalam prakteknya ada banyak tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2012). Adapun tujuan dari rasio profitabilitas yaitu :

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perhitungan rasio profitabilitas adalah :

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perperusahaan dalam satu periode;
b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;;
c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.2.4.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio rentabilitas. Ratio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Darmawan, 2020).

Penelitian ini mengukur profitablitas dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) yang merupakan rasio profitabilitas yang mengukur laba bersih setelah dikurangi pajak, bunga dan penyusutan. NPM digunakan dalam mengukur persentase tingkat penjualan yang telah dijadikan laba bersih atau bisa dilihat dari perbandingan antara total penjualan dengan laba bersih dalam jangka waktu tertentu. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.2.5 Likuiditas

2.2.5.1 Pengertian Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas (*Liquidity Ratio*) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat.Rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. Rasio likuididas menunjukkan tingkat kemudahan relative suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai; serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh (Hidayat, 2018).

Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang illikuid. Pada saat jatuh tempo, Perusahaan harus membayar kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha, ataupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya perusahaan harus memiliki jumlah kas atau investasi atau aktiva lancar lainnya yang dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajibanya seperti membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo (Darmawan, 2020).

2.2.5.2 Pengukuran Rasio Likuiditas

Pengelolaan likuidaitas sangat diperlukan bagi setiap kegiatan bisnis untk dapat membayar hutang jangka pendek tanpa adanya kesulitan dalam membayar. Pengukuran rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan *current ratio* yang menunjukkan sejauh mana akitva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya (Darmawan, 2020). Adapun rumus dari *current ratio* adalah :

$$\textit{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liability}}$$

2.2.6 Integrasi Islam

2.2.6.1 Perpajakan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, berbagai macam pungutan yang dilakukan oleh negara pertama kalinya terjadi ketika adanya pungutan *kharaj* yang diprakarsai pada masa khalifah ‘Umar Ibnu Khatab yang didasarkan pada ijtihadnya yang diterima oleh para sahabat yang lain, sehubungan dengan wilayah taklukan di Iraq (Sawad al-‘Iraq). Setelah itu ada pungutan lain yang bernama ‘*Usyr* sebagai respon dari laporan yang diterima khalifah dari Abu Musa al-Asy’ari ra. dan surat dari penduduk Manbij. Keputusan memungut ‘*Usyr* ini pun ditetapkan “Umar melalui musyawarah dengan para sagabat nabi yang lain. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, munculah berbagai bentuk pungutan di luar yang telah disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*dharibah*). Ini adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara. Sejalan dengan perkembangan kehidupan pula, jenis-jenis pajak pun semakin beraneka (Al Hasan & Iman, 2017). Berikut adalah istilah penting dari instrumen pendapatan negara dalam Islam :

a. Ghanimah

Ghanaimah merupakan salah satu pendapatan negara yang diperoleh dari hasil kemenangan dalam peperangan. Inilah sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Distribusi hasil *ghanimah* secara khusus diatur langsung dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke 41, yaitu empat perlima dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkannya atau seperlimanya (*khumus*) diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil.

b. Fay’i

Secara terminolgi *fay’i* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta rampasan yang diperoleh kaum muslim dengan tanpa terjadinya pertempuran. Dengan demikian, termasuk di dalamnya adalah pajak yang

dikenakan kepada tanah (*kharaj*), pajak yang dikenakan pada kepala (*jizyah*), dan pajak yang dikenakan pada bea-cukai (‘*usyr*). Mengenai harta *fay’I*, Al-Ghazali menyebutnya dengan “harta untuk kemashlahatan”

c. *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan pemerintah Islam yang kemudian dirampas dan dijadikan milik negara. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak langsung diambil sebagai kekayaan negara, tetapi diberikan kepada yang ingin mengelolanya (baik muslim atau non-muslim) dengan syarat membayar pajak.

d. ‘*Usyr* (Cukai)

‘*Usyr* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, ‘*usyr* hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Namun untuk mempercepat peningkatan perdagangan, Rasulullah SAW memberikan insentif berupa penghapusan pajak bea-cukai terhadap barang-barang milik utusan yang sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.

e. *Jizyah* (Upeti)

Jizyah dapat disebut juga sebagai pajak kepala atau pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Mereka tetap wajib membayar *Jizyah*.

f. *Zakat* (Shadaqah Wajibah)

Zakat adalah kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. *Zakat* merupakan kewajiban bagi golongan yang mampu (*aghniya*) sebagai bentuk perimbangan harta di antara sesama masyarakat.

g. Sumber Lainnya

Apa yang disebutkan di atas merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang utama dalam perspektif ekonomi Islam. Namun selain itu masih ada beberapa pendapat lainnya yang disebut dengan pendapatan sekunder yang diperoleh secara tidak tetap, seperti: *ghulul, kaffarat, luqathah, waqaf*, uang tebusan, *khums* atau *rikaz*, pinjaman, *amwalfadhla, nawa'ib*, hadiah, dan lain-lain.

2.2.6.2 Hutang dalam Perspektif Islam

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan didalam mengelola fungsi keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini perusahaan berfokus pada struktur modal yang didapat dari dalam perusahaan (modal sendiri) berupa modal saham, laba ditahan, cadangan, maupun dari luar perusahaan (modal asing) berupa hutang. Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri dari hutang jangka panjang dan modal sendiri.

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam islam hutang dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. Qardh juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya (Cahyadi, 2014). Ajaran agama islam membolehkan hutang karena hutang adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (*hablun minan naas*) sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam alquran berikut ini:

- QS : Al-Maidah (5) : 2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan."*

- QS : Al- Baqarah (2) : 280

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : *"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*

Hutang Piutang merupakan mualah yang diperbolehkan dalam ajaran islam, akan tetapi dalam melaksanakan muamalah ini terdapat rambu-rambu yang perlu diperhatikan, karena hutang dapat membawa kita kepada surga dan juga dapat mendorong kita kepada neraka (Cahyadi, 2014). Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun dan Syarat Qardh (pinjaman/hutang) adalah sebagai berikut:

- Rukun *Qardh* :
  a. Peminjam (*Muqtaridh*)
  b. Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*Muqridh*)
  c. Jumlah dana (*Qardh*)
  d. Ijab Qabul (*Sighat*)
- Syarat *Qardh*
  a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
  b. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal

2.2.6.3 Profitabilitas dalam Perspektif Islam

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Allah SWT telah mempersilakan manusia mencari keuntungan dari bumi ini, dengan syarat agar selalu bersyukur. Salah satu wujud dari syukur ini dapat berupa berbagai dengan sesama. Oleh karena itu tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal sebaiknya disertai dengan tujuan perusahaan untuk berbagi kepada sesama, alam dan lingkungan, baik

itu berbagi dalam bentuk pemberian sebagian laba, berbagi ilmu dan teknologi, maupun berbagi dengan cara lain yang dianggap bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Bukan keuntungan yang bermanfaat buat diri sendiri atau kelompoknya saja (Ekasari, 2014)

Hampir semua perusahaan di dunia ini mendirikan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh laba. Ayat dari *Asy Syura* mengajarkan bahwa apabila manusia hanya menginginkan keuntungan duniawi saja, maka Allah SWT akan menambah keuntungan duniawi tersebut sedikit saja tanpa memberi keuntungan di akhirat, sementara apabila manusia menginginkan keuntungan di akhirat dia akan mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat. Adapun ayatnya adalah sebagi berikut:

QS Asy Syura : 20

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَاۙ وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

Artinya : *"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan-keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat"*

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan teori-teori yang ada, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

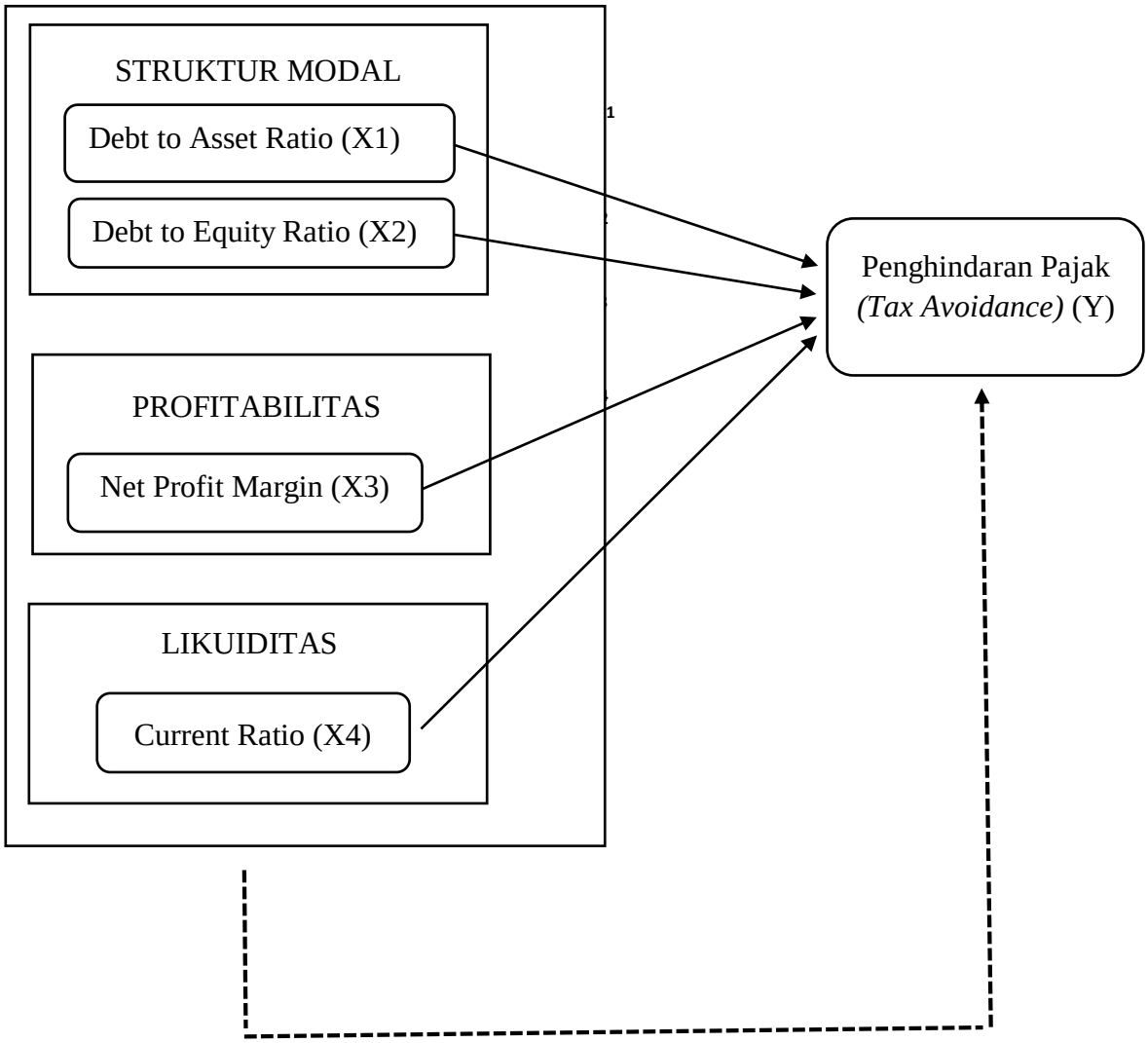

Keterangan : ⟶ **Pengaruh Parsial**

⟶ Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Debt to Asset Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*

Debt to Asset Ratio merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah asset perusahaan dibiayai dengan total utang.. semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020). Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak yang lebih efektif, Sehingga bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* lebih rendah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. *Leverage* berpengaruh negatif berarti semakin tinggi kewajiban jangka panjang perusahaan maka indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin rendah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : *Debt to Asset Ratio* (DAR) Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*

Debt to Equity Ratio menerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin tinggi Debt to Asset Ratio maka beban bunga perusahaan juga akan meningkat yang mampu mempengaruhi beban pajak perusahaan, sehingga dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ariawan & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadini & Ariani, 2019) yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio*. berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Beban pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, maka kepemilikan institusional akan mengawasi

manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar mendapatkan laba yang optimal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H_2 : *Debt to Equity Ratio* (DER) Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh *Net Profit Margin* Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan aktivitas operasinya (Ariawan & Setiawan, 2017). Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015) menyatakan bahwa bahwa *Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax palnning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Akan tetapi berbeda hal nya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jamaludin, 2020) yang menyatakan bahwa Profitabilitas *(Return On Assets)* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H_3 : *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadapT*ax Avoidance.*

2.4.4 Pengaruh *Current Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu

perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indradi, 2018) menyatakan bahwa likuiditas memilik pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Margie & Habibah, 2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena likuiditas yang terlalu menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur akan dianggap kurang produktif. Tapi jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan bisa berakibat pinjaman modal oleh para kreditur menurun. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H_4 : *Current Ratio* berpengaruh terhadapT*ax Avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas (Priyono, 2008). Teori deskripsi dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan tiga variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin ban yak variabel yang diteliti, maka akan semakin ban yak teori yang perlu dikemukakan (Sugiyono, 2017).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data berupa laporan keuangan Perusahaan Sektor Industri Manufaktur tahun 2015-2019. Objek penelitian ini dipilih karena perusahaan sektor industri manufaktur merupakan salah satu industri yang menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk meciptakan kesejateraan bagi para pemegang saham sehingga perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang tidak pernah lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, kemudian perusahaan akan senantiasa berupaya menghasilkan produk

yang memiliki nilai lebih, tetapi juga perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik demi keberlangsungan usahanya. Selain itu laporan keuangan akan digunakan sebagai data dalam proses penelitian ini dipublikasikan dan dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Industri Manufaktur perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan transaksi serta membuat laporan keuangan tahunan periode 2015-2019. Data dalam penelitian ini dilakukan dalam 5 periode tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 sehingga data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan terbaru. Adapun sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 dengan kriteria tertentu.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel merupakan cara dalam memilih sample untuk studi tertentu. Penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu agar dapat menghasilkan data sesuai dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Beberapa kriteria yang diterapkan untuk memilih sampel dalam Perusahaan Sektor Industri Manufaktur Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang digunakan sebagai data adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019.
2. Perusahaan yang digunakan sebagai data adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang memiliki laporan keuangan pada tahun2015-2019.
3. Perusahaan yang digunakan sebagai data adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 2015-2019.
4. Perusahaan yang digunakan sebagai data adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2015-2019
5. Perusahaan yang digunakan sebagai data adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang menyampaikan data secara lengkap, laporan keuangan selama periode penelitian 2015-2019 berkaitan dengan rasio keuangan yang diukur dengan struktur modal menggunakan *Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio,* dan profitabilutas menggunakan *Net Profit Margin* dan likuiditas dengan menggunakan *Current Ratio*.

Berdasarkan kriteria-kriteria purposive sampling yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh data penelitian dari populasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Pemilihan Sampel

Kriteria	**Jumlah**
Perusahaan sektor industri manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	182
Perusahaan sektor industri manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2015-2019	(79)
Perusahaan sektor industri manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2015-2019	(49)

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor industri manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	(12)
perusahaan sektor industri manufaktur yang tidak meiliki kelengkapan data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini selama tahun 2015-2019	(5)
Perusahaan yang terpilih sebagai sampel	37
Tahun Pengamatan	5
Jumlah data selama periode penelitian	185

(Sumber : www.idx.co.id – data diolah)

Berikut ini merupakan perusahaan manufaktur yang sesuai denga kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian :

Tabel 3. 2

Daftar Sampel

NO	Kode Saham	Nama Emiten
1	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
2	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
4	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
5	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
6	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk
7	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
8	HMSP	PT H.M. Sampoerna Tbk
9	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
10	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
12	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk

NO	Kode Saham	Nama Emiten
13	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
14	UNVR	PT Unilever Indonesia
15	CINT	PT Chitose International Tbk
16	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk
17	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
18	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
19	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
20	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
21	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
22	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk
23	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk
24	LION	PT Lion Metal Works Tbk
25	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
26	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
27	INDS	PT Indospring Tbk
28	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
29	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
30	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk
31	TRIS	PT Trisula International Tbk
32	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk
33	JECC	PT Jombo Cable Company Tbk
34	KBLI	PT KMI Wire & Cable
35	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
36	VOKS	PT Voksel Electric Tbk
37	BATA	PT Sepatu Bata Tbk

(Sumber : www.idx.co.id – data diolah)

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen / publikasi / laporan penelitiam dari Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (data *documenter*) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Indriantoro & Supomo, 2014), sehingga dalam melakukan penelitian ini menggunakan data berupa informasi laporan keuangan Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 yang diperoleh dari website www.idx.co.id.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teridi dari dua cara, yaitu :

1. Studi kepustakaan

   Teknik studi kepustakaan dijadikan sebagai sebuah langkah awal dalam melakukan penelitian, teknik studi kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan, diharapkan dapat memperkuat landasan teori peneliti dalam memahami kondisi atau fakta yang dikaitkan dengan teori yang ada. Adapun data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literature dan penelitian sejenisnya.

2. Dokumentasi

   Metode dokumentasi yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini yaitu melalui dokumen-dokumen laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 31 Desember 2015 sampai dengan 2019. Sumber data berupa laporan keuangan ini yang termasuk kedalam data sekunder dimana dokumen ini dapat diakses secara langsung melalui website www.idx.co.id.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu konstruk, atribut atau sifat atau nilai seseorang, obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk kemudian dipelajari serta dicari informasinya dan ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, variable yang digunakan berupa variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Berikut adalah definisi operasional variabel secara garis besar :

Tabel 3. 3

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Definisi dan Pengukuran
Variabel Independen			
1.	Struktur Modal	*Debt to Asset Ratio* (DAR) X1	*Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah suatu rasio perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, yang biasa disebut sebagai rasio hutang (*Debt Ratio*) mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Dalam penelitian (Nursasmita, 2021) Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio DAR yaitu dengan menggunakan rumus : $\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$
		Debt to Equity Ratio (DER) X2	*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio perbandingan total hutang dengan modal sendiri. Dalam penelitian (Rahmadini & Ariani, 2019) yang menghitung rasio DER yaitu dengan menggunakan rumus: $\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$

No	Variabel	Indikator	Definisi dan Pengukuran
2.	Profitabilitas (X3)	*NetProfit Margin* (NPM)	*Net Profit Margin (*NPM) digunakan untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. **Invalid source specified.**. Untuk menghitung rasio NPM, dengan menggunakan rumus : $NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$
3.	Likuiditas (X4)	*Current Ratio*	*Current Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (suyanto dan suprapmono 2012). Adapun rumusnya adalah: $\textit{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
Variabel Dependen			
4.	*Tax Avoidance* (Y)	*Efecctive Tax Rate (ETR)*	*Efecctive Tax Rate (ETR)* adalah Perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh (Indradi, 2018). Adapun rumusnya adalah:

No	Variabel	Indikator	Definisi dan Pengukuran
			$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, analisis regresi liner berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan program SPSS.

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskrriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2017). Pengukuran statistik desktiptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, nilai maksimum, nilai minimum, dam standar deviasi.

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan serta menganalisa hubungan antara satu variabel dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial. Analisis regresi liner berganda bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial (Sugiyono, 2017). Analisis regresi liner berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \ldots$$

Keterangan	
Y	= Tax Avoidance
α	= Konstansta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien Regresi
X_1	= Debt to Asset Ratio
X_2	= Debt to Equity Rattio
X_3	= Net Profit Margin
X_4	= Current Ratio

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas, dan uji autokorelasi.

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan apakah model regresi variabel yang ada memiliki distribusi normal, karena model regresi yang memiliki distribusi data yang normal maupun mendekati normal dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0.05 atau 5%. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Kolmogorov-Sminov lebih besar dai 5% sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5% maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Indicator yang baik adalah tidak adanya korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat diketahui dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam regresi.

3.8.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk pengujian pada model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu ke residual pengamatan lainnya tetap, maka dinamakan homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas.

3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi disebabkan adanya observasi secara beruntun sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk menguji ada tidaknya korelasi yang sempurna untuk masing-masing data pengamatan, dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik D_W atau *Durbin Watson Test.* Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin yang nantinya dibandingkan denagn nilai Durbin Watson T table, yaitu nilai Durbim Lower (D_L) dan Durbin Upper (D_U) dengan ketentuan :

e. Jika nilai DW < $d_{L,}$ maka diindikasikan terdapat autokorelasi positif;
f. Jika nilai DW > d_U dan (4-DW) > d_U atau dengan notasi

d_U < DW<(4-d_U), maka diindikasikan tidak ada autokorelasi;

g. Jika (4-DW) < d_L, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif.

3.8.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas berupa struktur modal yang menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) serta profitabilitias yang menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) dan Likuiditas yang menggunakan *Current Ratio* terhadap variabel terikat berupa penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Uji hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

3.8.4.1 Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Menurut (Dergibson Siagian dan Sugiarto, 2002), nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menunjukan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar R^2 maka semakin bagus regresi yang terbentuk. Bila $R^2 = 1$ maka garis regeresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Nilai R^2 menunjukan berapa persen perubahan variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan (1 - R^2) sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

3.8.4.2 Uji F Statistik

Nilai statistik F digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya degan tingkat signifikan yang digunakan yaitu α =5% atau 0,5. Dalam penelitian ini uji F dilakukan untu menguji apakah keseluruhan variabel independen berupa struktur modal yang menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER), profitabilitias yang menggunakan Net Profit Margin (NPM) dan Likuiditas yang menggunakan *Current Ratio* memiliki pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen berupa penghindaran pajak *(tax Avoidance)*. Dasar pengambilan kesimpulan dari uji F, dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan bantuan software pengolah data. Jika signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima yang menunjukan bahwa model regresi *fit*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, hal ini menunjukan bahwa model regresi tidak *fit.*

3.8.4.3 Uji T Statistik

Dalam penelitian ini, uji T statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel bebas berupa struktur modal yang menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER), profitabilitias yang menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) dan likuiditas yang menggunkan *Current Ratio* terhadap variabel terikat berupa penghindaran pajak *(tax Avoidance)* secara signifikan. Dengan tingkat signifikansi terntentu, bila | t-hitung | > $t_{(\alpha-1)}$ maka H_0 ditolak, hal ini menunjukan variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hipotesis secara umumnya adalah :

H_0 : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah tidak signifikan

H_1 : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependennya adalah signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 182 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Tekik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Sample yang tidak sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 perusahaan, sehingga jumlah sample yang akan diteliti adalah 49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, sehingga data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 245.

Berikut merupakan gambaran singkat perusahaan yang digunakan sebagai sample dalam penelitian

1. PT Delta Djakarta Tbk

   Pada 1997, Perseroan memulai rencana ekspansi besar-besaran dengan memindahkan pabrik pembuatan bir dari lokasi awal di Jakarta Utara ke fasilitas yang lebih besar dan modern di lokasinya saat ini di Bekasi, Jawa Barat. PT Jangkar Delta Indonesia, anak perusahaan PT Delta, didirikan pada 1998, dan menjadi distributor tunggal Perseroan, dengan jejaring distribusi yang menyebar ke seluruh negeri, mulai dari Medan di Sumatra Utara hingga ke Jayapura di Papua. Namun, pada semester pertama 2017, anak perusahaan memindahkan seluruh karyawannya ke Perseroan dan pada akhir tahun, anak perusahaan hanya menangani satu sub-distributor. Sejauh ini, Perseroan tidak berencana menghentikan operasional PT Jangkar Delta Indonesia.

PT Delta memproduksi bir Pilsner dan Stout berkualitas untuk pasar domestik Indonesia, dengan sejumlah merek di antaranya Anker Bir, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra, dan Kuda Putih. PT Delta juga memproduksi dan mengekspor bil Pilsner dengan merek "Batavia". Dan kuartal terakhir 2017 menandai awal ekspor bir PT. Delta Djakarta Tbk ke negara tetangga, Timor Leste.

2. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

   ICBP berawal dari Grup Produk Konsumen Bermerek (Consumer Branded Product atau "CBP") perusahaan induknya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Indofood") yang mulai memproduksi mi instan pada tahun 1982. Di tahun 1985, Grup CBP memulai kegiatan usaha di bidang nutrisi dan makanan khusus, dan di tahun 1990 mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan. Indofood melakukan restrukturisasi berbagai kegiatan usaha produk konsumen bermerek di bawah Grup CBP untuk membentuk ICBP. Sejak pendirian ICBP sebagai entitas terpisah, Perseroan terus mengembangkan usahanya dan memperkuat kepemimpinannya di berbagai segmen pasar. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ("ICBP" atau "Perseroan") merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka, dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi, antara lain mi instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel maupun karton untuk produk-produk kami.

3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk

   PT Indofood Sukses Makmur Tbk., yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma di tahun 1990, memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980an. Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Dalam dua dekade

terakhir, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari empat Kelompok Usaha Strategis (”Grup”) yang saling melengkapi yaitu Produk Konsumen Bermerek (“CBP”), Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi.

4. PT Multi Bintang Indonesia Tbk

   Sejarah panjang perusahaan dimulai dengan didirikannya N.V. Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen di Medan pada tahun 1921. Brewery pertama berada di Surabaya dan secara resmi beroperasi secara komersial pada 21 November 1931. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan, brewery kedua dibangun di Tangerang. Di tahun yang sama, perusahaan berganti nama menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia. Brewery kedua ini kemudian mulai beroperasi pada tahun 1973. Untuk mencerminkan peningkatan usaha dan aktivitas akuisisi ini, sejak tanggal 2 September 1981, nama perusahaan menjadi PT Multi Bintang Indonesia dan tempat kedudukan kemudian dipindahkan ke Jakarta. Perusahaan juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di 2014, Multi Bintang sekali lagi menciptakan tonggak sejarah dengan membangun fasilitas produksi baru yang dilengkapi teknologi canggih untuk memproduksi minuman non-alkohol di Sampangagung, Jawa Timur.

5. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

   Sejak 1995, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. telah memproduksi berbagai macam jenis roti dengan merek Sari Roti. Sebagai perusahaan produsen roti terbesar di Indonesia, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk telah mendirikan pabrik di seluruh di Indonesia untuk memenuhi dan melayani seluruh

konsumen. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis dan terjangkau bagi seluruh konsumen berupa roti tawar, roti isi dan kue.

6. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

   PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk merupakan pelopor dalam proses ultra high temperature ("UHT") di Indonesia, memiliki hubungan rekanan dengan Tetra Pak sejak tahun 1975 serta menjadi Produsen terbesar susu UHT di Indonesia dengan memproduksi secara langsung atau melalui entitas perusahaan patungan (joint venture / "JV") atau manufaktur toll susu kental manis, minuman kesehatan, keju, susu bubuk dan jus. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk membagi usaha kami menjadi tiga area yaitu Produk Susu, Teh dan Minuman Kesehatan, dan Lain-lain.

7. PT Gudang Garam Tbk

   Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot (SKL), sigaret kretek linting-tangan (SKT), hingga sigaret kretek linting-mesin (SKM). Bagi Anda para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi.

8. PT H.M. Sampoerna Tbk

   PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Sampoerna”) telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari seratus tahun sejak berdiri tahun 1913, dengan produk legendaris Dji Sam Soe atau dikenal dengan “Raja Kretek”. Sampoerna adalah pencetus kategori Sigaret Kretek Mesin Kadar Rendah (SKM LT) di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampoerna A pada tahun 1989. Produk Utama dalam Sampoerna A

adalah merek terdepan di pasar rokok Indonesia. Sampoerna juga memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas termasuk Marlboro Filter Black, Sampoerna U, Philip Morris Bold dan Sampoerna Kretek.

Selama lebih dari 10 tahun, Sampoerna memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 32,2% pada tahun 2019. Sampoerna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia ("PMID") dan afiliasi dari Philip Morris International Inc. ("PMI"), perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global Marlboro. Ruang lingkup kegiatan Sampoerna meliputi, antara lain manufaktur, perdagangan dan distribusi rokok termasuk juga mendistribusikan Marlboro merek rokok internasional terkemuka yang diproduksi oleh PMID.

9. PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

   PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Darya-Varia" atau "Perseroan") adalah perusahaan industri farmasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang berdiri pada 1976. Pada November 1994, Darya-Varia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham DVLA. Pada 1995, Darya-Varia mengakuisisi PT Pradja Pharin (Prafa) dan menjadi entitas induk yang terus mengembangkan sayapnya pada sektor kesehatan di Indonesia. Pada 2014, Perseroan melakukan merger dengan Prafa, yang menggabungkan diri ke dalam Darya-Varia. Saat ini, Darya-Varia mengoperasikan dua pabrik yang telah memenuhi standar internasional Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

10. PT Kimia Farma Tbk

    Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan

peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia.

11. PT Kalbe Farma Tbk

    Berdiri pada tahun 1966, Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha & akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya: Divisi Obat Resep (kontribusi 23%), Divisi Produk Kesehatan (kontribusi 17%), Divisi Nutrisi (kontribusi 30%), serta Divisi Distribusi and Logistik (kontribusi 30%). Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari satu juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di pasar internasional, Perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor.

12. PT Tempo Scan Pacific Tbk

    PT Tempo Scan Pacific Tbk (“Perseroan”) dan entitas anaknya merupakan bagian dari Tempo Grup yang memulai kegiatan usahanya melalui pendirian

PT PD Tempo pada tanggal 3 Nopember 1953 yang bergerak di bidang perdagangan produk farmasi. Perseroan dibentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1991 dan semula Perseroan bernama PT Scanchemie yang pada tahun 1970 memulai kegiatan produksi komersial produk farmasi dalam skala besar. Seiring dengan perjalanan waktu, Perseroan melalui entitas anaknya juga telah memproduksi produk kosmetik dan produk konsumen sejak tahun 1977. Pada tahun 1994 Perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan saham-sahamnya sejumlah 75.000.000 lembar saham di Bursa Efek Indonesia/BEI (dahulu Bursa Efek Jakarta/BEJ).

13. PT Mandom Indonesia Tbk

    PT Mandom Indonesia Tbk didirikan tanggal 5 November 1969 dengan nama PT Tancho Indonesia Co. Ltd, bergerak dibidang industry kosmetika, wangi-wangian, toiletries, bahan pembersih / perbekalan kesehatan rumah tangga, kemasan plastic dan barang-barang dari plastic lainnya. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 September 1993. Perusahaan mencatat laba yang diperoleh secara kontinu pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

14. PT Unilever Indonesia

    Unilever Indonesia, yang berdiri pada 5 Desember 1933, telah tumbuh hingga kini menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori Fast Moving Consumer Goods di Indonesia. Saham Unilever Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Lebih dari 400 brand memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Mulai dari rangkaian brand produk rumah tangga kami, seperti Dove, Axe, Lipton, Knorr, Hellman’s, dan Omo hingga brand yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus konsumen lokal seperti Pure It dan Suave.

15. PT Chitose International Tbk

    Di sela pembangunan ekonomi Indonesia, tahun 1979 PT. Chitose Indonesia Manufacturing didirikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan mulai memproduksi kursi-kursi berteknologi tinggi. Sejak tahun 1981, Chitose terus mengembangkan produk atas dasar penelitian ergonomi mebel dan pemahaman pasar Indonesia yang mendalam. Berawal dari sebuah kursi lipat, yang telah menjadi ikon industri mebel Indonesia, yang kemudian terus tumbuh dan kini memproduksi lebih dari 200 varian mebel dan tempat tidur rumah sakit. Kami pun menghasilkan membel khusus sesuai spesifikasi dari pelanggan. Tingkat produksi per tahun pun mencapai 1,2 juta unit pada tahun 2013. Memasarkan mebel hingga ke pelosok, kami memiliki jaringan distributor dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki jaringan pemasaran ekspor di 34 negara.

16. PT Wijaya Karya Beton Tbk

    PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WIKA Beton) didirikan sebagai salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada tahun 1997 dengan visi Menjadi Perusahaan Terkemuka Dalam Bidang Engineering, Production, Installation (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara. Saat ini WIKA Beton merupakan produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. WIKA Beton telah memiliki 14 (empat belas) pabrik dan 1 (satu) mobile plant yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki pertumbuhan industri konstruksi yang tinggi. WIKA Beton juga memiliki 3 (tiga) Crushing Plant di Cigudeg Bogor, Lampung Selatan dan Donggala Palu. WIKA Beton menerapkan pola Precast Engineering-Production-Installation (EPI). WIKA Beton telah memiliki tiga anak usaha yakni PT Wijaya Karya Komponen Beton, PT Wijaya Karya Krakatau Beton, PT Wijaya Karya Citra Lautan Teduh dan satu perusahaan asosiasi PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.

17. PT Arwana Citramulia Tbk

PT Arwana Citramulia Tbk (Arwana) merupakan perusahaan publik yang didedikasikan untuk memproduksi ubin keramik yang mulai beroperasi sejak tahun 1995 ini, berkantor pusat di Jakarta. Sejak awal beroperasinya, Arwana tetap setia dalam bisnis inti dasar kompetensi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan desain kreatif. dasar kompetensi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan desain kreatif. Berbagai macam produk termasuk Embossed, Marmer, Plain Color, Granity, Strata, Rustic, Fancy Kayu dan Dekorasi Fancy telah dihasilkan. Arwana menjual produk melalui distributor tunggal, PT Primagraha Keramindo (PGK) yang merupakan anak perusahaan dari Nirwana sendiri. Selain itu distribusi juga dilakukan oleh lebih dari 40 sub-distributor yang tersebar di hampir setiap kota dan kota-kota besar di Indonesia bersamaan dengan ribuan outlet ritel.

18. PT Surya Toto Indonesia Tbk

    Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) didirikan tanggal 11 Juli 1977 dalam rangka Penanaman Modal Asing dan memulai operasi komersil sejak Februari 1979. Kantor pusat TOTO terletak di Gedung Toto, Jalan Tomang Raya No. 18, Jakarta Barat 11430 dan pabrik berlokasi di Tangerang. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TOTO meliputi kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk sanitary (kloset, wastafel, urinal, bidet, dan lain-lainnya), fittings (kran, shower, dan lainnya) dan peralatan sistem dapur (sistem dapur, lemari pakaian, vanity, dan sebagainya) serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan produk tersebut.

19. PT Argha Karya Prima Industry Tbk

    PT Argha Karya Prima Industry Tbk, atau lebih dikenal dengan Argha, terbentuk pada tahun 1980, merupakan pelopor pada industri kemasan fleksibel di Indonesia. Perseroan mulai beroperasi secara komersial mulai tahun 1982 dengan pabrik yang berlokasi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perseroan antara lain bergerak dalam bidang perindustrian dan pemasaran barang-barang dari

plastik dan menjalankan industri barang-barang dari plastik, termasuk jenis film Polypropylene dan Polyethylene Terepthalate. Produk utama yang dihasilkan Perseroan adalah kemasan fleksibel plastik film jenis BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) dan BOPET (Biaxially Oriented Polyethylene Terepthalate) atau Polyester. Masing-masing jenis plastik film tersebut dipasarkan dengan merek dagang ARLENE dan ARETA. Merek dagang tersebut telah dikenal cukup luas di dunia dan banyak digunakan antara lain untuk aplikasi kemasan makanan, rokok, laminasi kertas, label maupun pembungkus umum lainnya.

20. PT Tunas Alfin Tbk

    Dibangun pada filosofi yang didirikan pada tahun 1977, PT Tunas Alfin Tbk, sebuah perusahaan yang go public pada tahun 2001, tetap berkomitmen sampai saat ini untuk pembuatan produk-produk berkualitas tanpa kompromi, pengiriman kepuasan pelanggan, dan inovasi yang berkelanjutan. Selama 25 tahun terakhir, komitmen perusahaan pada layanan, kualitas produk, dan kebutuhan untuk terus meningkatkan diri, telah memberikan hak istimewa untuk menjadi mitra bisnis dari perusahaan rokok, makanan konsumen, dan produk industri dibidang kesehatan dan kebersihan. Sebagai perusahaan bersertifikat ISO 22000 : 2005, perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan secara profesional dan berkualitas kepada semua pelanggan dan mitra bisnis.

21. PT Ekadharma International Tbk

    Ekadharma International Tbk (dahulu Ekadharma Tape Industries Tbk) (EKAD) didirikan tanggal 20 Nopember 1981 dengan nama PT Ekadharma Widya Graphika dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1981. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan EKAD adalah bergerak dalam bidang pembuatan pita perekat dan memproduksi bahan baku dan atau bahan penolong yang diperlukan serta usaha perdagangan pada umumnya. Kegiatan utama EKAD adalah pembuatan dan

pemasaran pita perekat (Cloth Tape, Double Sided Tape, Kraft Paper Tape, Masking Tape, Opp Tape, PVC Insulation Tape, Stationery Tape) serta Stretch Film dengan merek, antara lain: Daimaru, Daiichi, Anchor, Ekatape dan Superfix.

22. PT Intanwijaya Internasional Tbk

    PT Intanwijaya Internasional Tbk sebelumnya menggunakan nama PT Intan Wijaya Chemical Industry, didirikan pada tahun 1982 sebagai perusahaan manufaktur formalin dan berbagai produk turunan formalin. Perusahaan ini merupakan perusahaan kimia lokal pertama yang mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 24 Juli 1990 dengan inisial INCI. Kapasitas produksi PT. Intanwijaya Internasional Tbk saat ini berkisar antara 11.000 ton formalin 37%, 14.000 ton resin berbasis formaldehida (urea, melamin, jenis emisi fenol & rendah), 900 ton urea formaldehida bubuk lem, dan 500 ton hexamine. Perusahaan mengekspor produknya ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Srilanka, Thailand, Myanmar, China, Hong Kong, Papua Nugini, Ghana, dan Australia.

23. PT Indal Alumunium Industry Tbk

    Indal Aluminium Industry Tbk (Indal) (INAI) didirikan tanggal 16 Juli 1971 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INAI terutama adalah bidang manufaktur aluminium sheets, rolling mill, dan extrusion plant. Kegiatan produksi INAI adalah mengolah bahan baku aluminium ingot menjadi aluminium ekstrusion profil yang banyak digunakan dalam industri konstruksi, peralatan rumah tangga, komponen elektronik/otomotif, dan sebagainya. Indal Aluminium Industry Tbk memiliki 3 anak usaha, yaitu: PT Indalex (kegiatan usaha jasa konstruks), PT Indal Investindo (investasi) dan PT Indal Servis Sentra (perdagangan umum).

24. PT Lion Metal Works Tbk

Lion Metal Works Tbk (LION) didirikan tanggal 16 Agustus 1972 dalam rangka Penanaman Modal Asing "PMA" dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan LION meliputi industri peralatan kantor dan pabrikasi lainnya dari logam. Saat ini, kegiatan utama LION adalah memproduksi peralatan kantor, peralatan gudang, bahan bangunan dan konstruksi dan pabrikasi lainnya dari logam seperti lemari arsip (filing cabinet), lemari penyimpan; pintu besi tahan api; perlengkapan gudang, seperti rak tingkat dan pallet; penyangga kabel (cable ladder), peralatan rumah sakit, brankas, peralatan pengaman (safe and security equipment), dan lainnya.

25. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

    PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan di Indonesia dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972. Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, kegiatan usaha Perseroan adalah pembibitan ayam ras, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan ungags, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging ungags, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging ungags, industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, industri tepung campuran dan adonan tepung, industri makanan dan masakan olahan, industri bumbu masak dan penyedap masakan, industri ransum makanan hewan, industri produk farmasi untuk hewan, industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur), perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas cold storage.

26. PT Astra Otoparts Tbk

    Astra Otoparts merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beranekaragam suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Astra Otoparts Tbk (AUTO) didirikan tanggal 20 September 1991 dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AUTO terutama bergerak dalam perdagangan suku cadang kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor, dan manufaktur dalam bidang industri logam, plastik dan suku cadang kendaraan bermotor. Produk-produk suku cadang unggulan Astra Otoparts, antara lain: aki untuk kendaraan roda dua dan roda empat (merek GS, Incoe, dan Aspira), ban untuk kendaraan roda dua dan truk (Aspira dan Aspira Premio), suku cadang kendaraan roda dua dan roda empat (Aspira, Federal, KYB, dan TDW) dan pelumas untuk kendaraan roda empat dan industri (Shell Helix Astra dan HEO (Heavy Equipment Oil)).

27. PT Indospring Tbk.

    Indospring Tbk (INDS) didirikan tanggal 05 Mei 1978 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1979. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INDS bergerak dalam bidang industri spare parts kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa leaf spring (pegas daun), coil spring (pegas spiral) memiliki 2 produk turunan yaitu hot coil spring dan cold coil spring, valve spring (pegas katup) dan wire ring.

28. PT Selamat Sempurna Tbk

    Selamat Sempurna Tbk (SMSM) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMSM terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Merek produk dari Selamat Sempurna Tbk, antara lain: merek Sakura untuk produk S/F dan Filtration; dan merek ADR untuk produk radiator, dump hoist, coolant dan brake parts.

29. PT Ricky Putra Globalindo Tbk

Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) didirikan 22 Desember 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988. PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (Perseroan) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1998. Perseroan didirikan pada tahun 1987, kini menjadi salah satu perusahaan garmen dan tekstil terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Portofolio bisnis Perseroan mencakup sektor tekstil, garmen dan restaurant. Dengan portofolio usaha yang dimiliki, Perseroan mampu menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi baik untuk pelanggan domestik maupun internasional, serta memungkinkan Perseroan memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan di berbagai sektor sandang di Indonesia. Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan kegiatan operasional dan distribusi di berbagai wilayah nusantara.

30. PT Buana Artha Anugerah Tbk

    Didirikan dengan nama PT Star Asia International pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010, mengubah nama menjadi PT Star Petrochem. Perseroan menapaki babak baru dengan melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2011. Sejak saat itu, Perseroan tumbuh menjadi perusahaan perdagangan besar dengan komoditas benang, kapas, fiber. Perubahan nama kembali dilakukan pada tahun 2019 menjadi PT Buana Artha Anugerah Tbk. Perubahan ini berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 17 Juni 2019 yang disahkan dalam Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0094206.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019. Melalui perubahan tersebut, Perseroan berharap dapat menjaga ketahanan dan kemandirian dalam menghadapi tantangan, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan usaha bersama Entitas Anak.

31. PT Trisula International Tbk

Trisula International Tbk (sebelumnya PT Trisula Global Fashion) (TRIS) didirikan tanggal 13 Desember 2004 dengan nama PT Transindo Global Fashion dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2005. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TRIS antara lain menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industri tekstil serta usaha terkait lainnya. Trisula dan anak usahanya memproduksi pakaian jadi dan memiliki gerai penjualan (sales outlet) milik sendiri dan secara konsinyasi melalui kerja sama dengan retailer di beberapa pusat perbelanjaan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan. Produk-produk pakaian jadi dipasarkan dengan berbagai merek, antara lain: JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia, Man Club, G2000, Hallmark dan BONDS. Selain itu, Trisula dan anak usahanya juga memproduksi pakaian jadi untuk merek-merek terkenal internasional yaitu Hush Puppies, Eminent, Mizuno, Dillards, Basic House, dan lainnya.

32. PT Nusantara Inti Corpora Tbk

    Nusantara Inti Corpora Tbk (dahulu bernama United Capital Indonesia Tbk) (UNIT) didirikan tanggal 30 Mei 1988 dengan nama PT Aneka Keloladana dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1992. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha UNIT adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan investasi. Kegiatan usaha yang dijalankan UNIT saat ini adalah melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan komoditas tekstil, dan juga melakukan investasi melalui anak usaha, yaitu PT Delta Nusantara dengan kegiatan usaha perdagangan tekstil dan industri pemintalan benang.

33. PT Jombo Cable Company Tbk

    Berdiri pada bulan April 1973, PT Jembo Cable Company Tbk. memulai dengan memproduksi Kabel Listrik Tegangan Rendah - penghantar tembaga. Kemudian terus menambah varietas produknya, seperti Kabel Tegangan

Rendah - penghantar aluminium, Kabel Tegangan Menengah, Kabel Telepon dan Kabel Serat Optik dan juga memperluas pasarnya. Tahun 1992, Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia dan Mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang teknik dengan Fujikura Ltd., salah satu perusahaan kabel terkemuka dari Jepang. Mutu adalah hal yang paling diutamakan, hal ini terintegrasi erat dalam kinerja harian Perseroan. Investasi besar telah dilakukan demi menunjang terjaganya mutu barang dan jasa secara terus-menerus, dengan melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan di bidang Quality Control.

34. PT KMI Wire & Cable

    KMI Wire and Cable Tbk (dahulu GT Kabel Indonesia Tbk) (KBLI) didirikan tanggal 09 Januari 1972 dalam rangka Penanaman Modal Asing “PMA” dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan KBLI terutama meliputi bidang pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, telekomunikasi, baik yang terbungkus maupun tidak terbungkus, beserta seluruh komponen, suku cadang, assesori yang terkait dan perlengkapan-perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa kawat dan kabel. KBLI memproduksi lebih dari 2.000 jenis dan ukuran kabel, diantaranya kabel listrik tegangan rendah dan menengah, kabel kontrol serta kabel spesial lainnya seperti kabel data/instrumen, kabel flame retardant dan tahan api, kabel berjaket nylon dll. Selain itu, KBLI juga memproduksi berbagai jenis penghantar telanjang berbahan kawat tembaga, aluminium dan aluminium campuran yang banyak digunakan untuk transmisi dan distribusi tenaga listrik saluran udara.

35. PT Kabelindo Murni Tbk

    PT Kabelindo Murni Tbk. ("Kabelindo") merupakan salah satu perusahaan produsen kabel listrik dan kabel telekomunikasi tertua di Indonesia. Sejarah Kabelindo dimulai ketika didirikan pada tahun 1972 dengan nama PT Kabel

Indonesia ("Kabelindo"), kala itu Kabelindo adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian, pada tahun 1979, kepemilikan Kabelindo berubah menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan namanya berubah menjadi PT Kabelindo Murni dan disahkan dengan Akta Pendirian No.71 tanggal 11 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh kantor notaris Frederik Alexander Tumbuan, di Jakarta. Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan yang tercatat dalam Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang industri kabel listrik dan elektronik lainnya, serta perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.

36. PT Voksel Electric Tbk

    Didirikan pada tanggal 19 April 1971, PT Voksel Electric Tbk. ("Perusahaan") bergerak di bidang industri kabel. Pada tahun 1989, Perseroan berubah status menjadi Penanaman Modal Asing melalui perjanjian joint venture dengan Showa Electric Wire & Cable Co. Ltd. (“Showa”), sebuah perusahaan kabel terkemuka di Jepang yang telah berganti nama menjadi SWCC Showa Cable Systems Co. Ltd. sejak tahun 2006. Sejalan dengan pesatnya perkembangan industri kabel dan pertumbuhan strategis yang semakin agresif, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 20 Desember, 1990. Dengan kerja keras dan dedikasi dari seluruh manajemen dan staf Perusahaan, Perusahaan berhasil memposisikan diri sebagai salah satu produsen kabel terkemuka di Indonesia. Bisnis inti Perusahaan meliputi manufaktur kabel listrik, telekomunikasi, dan serat optik. Perseroan memasarkan produknya baik di dalam maupun ke luar negeri.

37. PT Sepatu Bata Tbk

    Sepatu Bata Tbk (BATA) didirikan tanggal 15 Oktober 1931.PT. Sepatu Bata TBK adalah produsen alas kaki dan anggota dari Bata Shoe Organization (BSO). Perseroan memproduksi berbagai macam alas kaki yaitu sepatu kulit dan sandal, sepatu berbahan kain kanvas dan sepatu olahraga. Perseroan

memiliki merek-merek terdaftar, disamping merek utama kita Bata, termasuk juga diantaranya adalah North Star, Bubblegummers, Marie Claire dan Weinbrenner juga Bata Indutrials.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti melalui sampel yang telah ditentukan. Pengkuran statistik deskriptif dalam penelitian ini melalui nilai mean, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi yang terdiri dari variabel *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin* dan *Current Ratio* sebagai variabel independen serta *Effective Tax Rate* sebagai variabel dependen. Hasil uji satatistik deskriptif dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. 1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAR	185	,55	,95	,7650	,09849
DER	185	,10	4,55	,8233	,81063
NPM	185	,00	,39	,0812	,07113
CURRENT RATIO	185	,58	9,68	2,6639	1,73116
ETR	185	,01	,97	,3041	,15139
Valid N (listwise)	185				

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2021

Tabel 4.1 menunjukan hasil analisis dengan uji statistik deskriptif, diketahui bahwa jumlah sampel sebyak 185 sampel. Dari sampel tersebut diketahui bahwa variabel *Debt To Asset Ratio* yang diukur dari perbandingan antara total hutang dengan total aktiva diperoleh hasil uji statistik deskriptif yang meyatakan bahwa nilai terkecil dari variabel tersebut 0,55 dan nilai

terbesarnya adalah 0,95. Rata-rata *Debt To Asset Ratio* adalah 0,7650 dengan standar deviasinya yaitu 0,09849. Nilai rata-rata menunjukan hasil yang lebih besar dari standar deviasinya yaitu 0,7650 >0,09849 yang menunjukan bahwa sebaran nilai *Debt To Asset Ratio* baik.

Variabel *Debt to Equity Ratio* yang diukur melalui perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas menunjukan hasil uji statistik deskriptif yang menyatakan bahwa nilai terkecil dari variabel tersebut adalah 0,10 dan nilai terbesarnya adalah 4,55. Rata-rata *Debt to Equity Ratio* sebesar 0,8233 dengan standar deviasinya sebesar 0,81063. Nilai rata-rata menunjukan hasil yang lebih besar dari standar deviasinya yaitu 0,8233>0,81063 yang menunjukan bahwa sebaran nilai *Debt To Equity Ratio* baik.

Variabel *Net Profit Margin* yang diukur berdasarkan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan menunjukan hasil uji statistik deskriptif yang menyatakan bahwa nilai terkecil dari variabel tersebut adalah 0,00, sedangkan nilai terbesarnya adalah 0,39. Rata-rata *Net Profit Margin* sebesar 0,0812 dengan standar deviasinya sebesar 0,07113. Nilai rata-rata menunjukan hasil yang lebih besar dari standar deviasinya yaitu 0,0812>0,07113 yang menunjukan bahwa sebaran nilai *Net profit Margin* baik.

Variabel *Current Ratio* yang diukur berdasarkan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar menunjukan hasil uji statistik deskriptif yang menyatakan bahwa nilai terkecil dari variabel tersebut adalah 0.58 dan nilai terbesarnya adalah 9,68. Rata-rata *Current Ratio* adalah sebesar 2,6639 dengan standar deviasinya sebesar 1,73116. Nilai rata-rata menunjukan hasil yang lebih besar dari standar deviasinya yaitu 2,6639>1,73116 yang menunjukan bahwa sebaran nilai *Current Ratio* baik.

Varibel *Effevtive Tax Rate* sebagai variabel dependen yang diukur berdasarkan perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak menunjukan hasil uji statistik deskriptif yang menyatakan bahwa niali terkecil dari variabel tersebut adalah 0,01 dan nilai terbesarnya adalah 0,97 pada. Rata-

rata *Effevtive Tax Rate* sebesar 0,3041 dengan standar deviasinya sebesar 0,15139. Nilai rata-rata menunjukan hasil yang lebih besar dari standar deviasinya yaitu 0,3041>0,15139 yang menunjukan bahwa sebaran nilai *Effevtive Tax Rate* baik.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menentukan ketetapan model yang dilakukan melalui empat pengujian yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun hasil dari uji asumsi klasih dralam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai regresi variabel yang ada berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitan ini uji normalitas dilakukan dengan cara pengujian melalui grafik histogram dan analisis grafik normal P-Plot (Probability Plot). Dasar pengambilan keputusan atas uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram yaitu dengan melihat bentuk diagram yang mengikuti garis berbentuk lonceng. Sedangkan pada grafik probability plot dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat titik menyebar yang berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan grafik histogram diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 4. 1
Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram

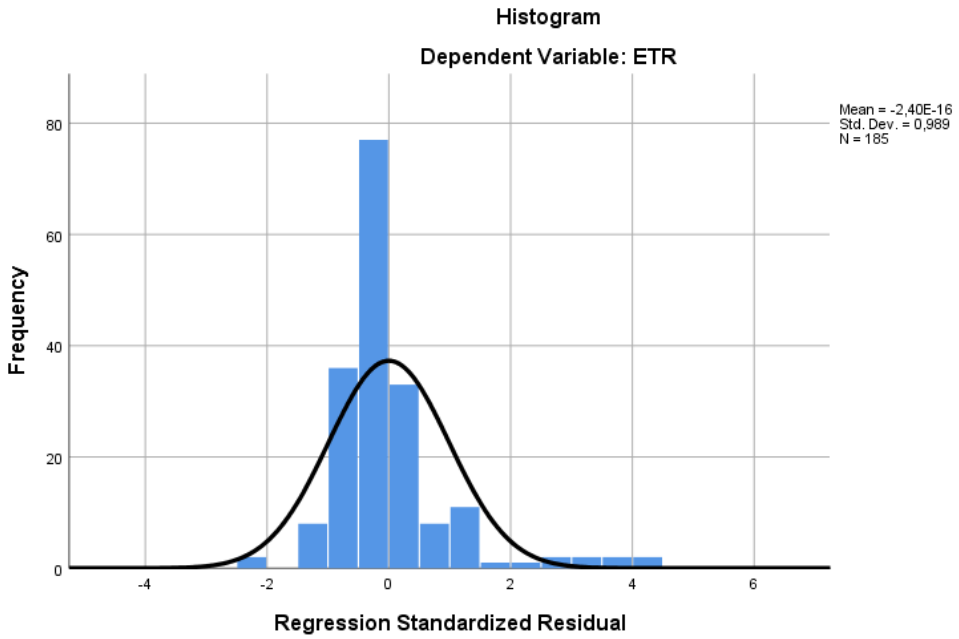

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan grafik histogram yang ditampilkan pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa bentuk diagram pada grafik tersebut mengikuti bentuk garis dan tidak melenceng baik ke kanan atau ke kiri, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan hasil dari uji normalitas menggunakan grafik probability plot diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 4. 2
Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot

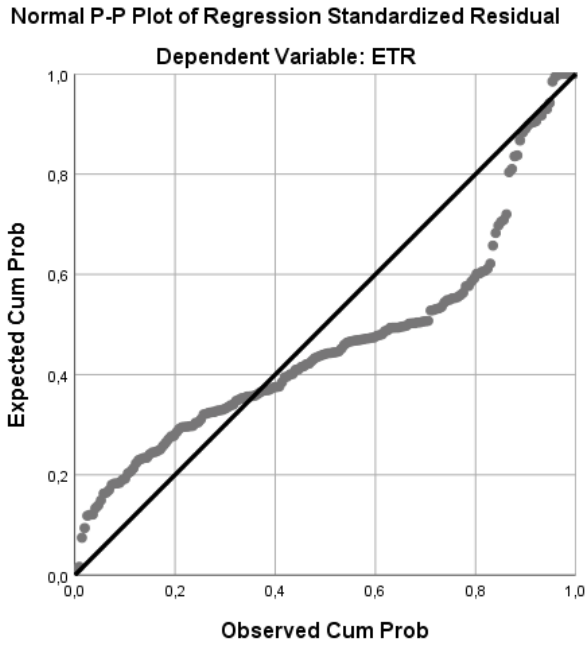

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan gambar 4.2, hasil uji normalitas dengan menggumakan grafik normal P-Plot terhadap model regresi antara *Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin*, dan *Current Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* terlihat dalam grafik tersebut bahwa titik titik menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang terdiri dari *Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin* dan *Current Ratio*. Model regresi dapat dikatakan baik jika hasil dari uji multikolinieritas tidak terdapat multikolinieritas. Untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan menentukan nilai *Variance Inflation*

Factor (VIF) dan nilai *Tolerance* (TOL), jika nilai VIF < 10 dan niai *tolerance* > 0.10 maka tidak mengandung multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DAR	,107	9,353
	DER	,234	4,280
	NPM	,817	1,224
	CURRENT RATIO	,222	4,508
a. Dependent Variable: ETR			

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji multikolinieritas menunjukan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat pada kolom *tolerance* yang menyatakan bahwa semua variabel memiliki nilai lebih dari 0,10 dimana *Debt to Asset Ratio* memiliki nilai 0,107, *Debt to Equity Ratio* memiliki nilai 0,234, *Net Profit Margin* memiliki nilai 0,817 dan *Current Ratio* memiliki nilai 0,222. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai VIF yang menyatakan bahwa semua variabel memiliki nilai kurang dari 10, dimana dimana *Debt to Asset Ratio* memiliki nilai 9,353, *Debt to Equity Ratio* memiliki nilai 4,280, *Net Profit Margin* memiliki nilai 1,224 dan *Current Ratio* memiliki nilai 4,508, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk pengujian pada model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan uji heteroskedastisitas scatterplots dengan melihat pola gambar pada grafik. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 3
Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplots

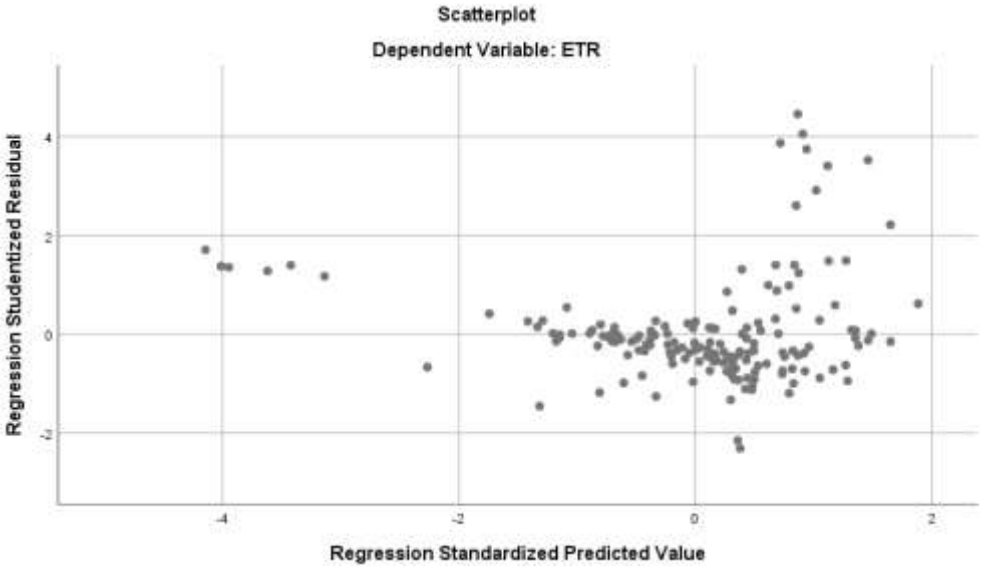

Berdasarkan gambar 4.3, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode grafik scatterplots menunjukan bahwa titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 tidak mengumpul di atas atau dibawah saja serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Utuk mengetahui hasil dari uji autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji *Durbin Watson* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,530[a]	,281	,260	,13046	2,048
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, DER, NPM, CURRENT RATIO, DAR					
b. Dependent Variable: ETR					

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (d) sebesar 2,048 dengan nilai signifikan 0,05. Adapun nilai dL dan dU diperoleh dari tabel *Durbin Watson* dengan jumlah sampel (n=185) dan variabel independen (k=4), sehingga diperoleh nilai dL = 1,7155 dan nilai dU sebesar 1,8037. Selain itu hasil dari 4-dU = 2,1963, yang artinya nilai dU<DW<(4-dU) atau 1,8037<2,048<2,1963, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang terdiri dari *Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Net profit Margin, dan Current Ratio* memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Effective Tax Ratio.* Hasil uji analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,284	,251		1,128	,261
	DAR	,081	,318	,053	,254	,800
	DER	,016	,026	,088	,626	,532
	NPM	-,872	,159	-,410	-5,470	,000
	CURRENT RATIO	,006	,013	,069	,478	,634
a. Dependent Variable: ETR						

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2021

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$

$Y = 0{,}284 + 0{,}081X_1 + 0{,}016X_2 - 0{,}872X_3 + 0{,}006X_4 + \varepsilon$

Keterangan :

Y = *Effective Tax Rate*

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = *Debt to Asset Ratio*

X_2 = Debt to Equity Ratio

X_3 = Net Profit Margin

X_4 = Current Ratio

ε = Error

Berdasarkan table 4.4 dan persamaan regresi diatas, koefisien regresi pada penelitian ini menunjukan hasil positif dan negarif dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya nilai konstanta adalah 0,284 yang berarti bahwa terdapat pengaruh dari variabel independen berupa dari *Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Net profit Margin, dan Current Ratio* terhadap variabel dependen berupa *Effective Tax Rate*. Nilai tersebut menyatakan bahwa jika variabel *Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Net profit Margin, dan Current Ratio* sama dengan 0 maka nilai Effective Tax Rate adalah 0,284.
2. Besarnya nilai koefisien *Debt to Asset Ratio* (X_1) sebesar 0,081, hal ini menunjukan adanya perubahan searah antara variabel *Debt to Asset Ratio* dengan *Effective Tax Rate* sehinnga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat 1% kenaikan dari *Debt to Asset Ratio* maka *Effective Tax Rate* akan mengalami peningkatan sebesar 0,081.
3. Besarnya nilai koefisien *Debt to Equity Ratio* (X_2) sebesar 0,016, hal ini menunjukan adanya perubahan searah antara *Debt to Equity Ratio* dengan *Effective Tax Rate*, yang artinya setiap 1% kenaikan yang terjadi pada *Debt to Equity Ratio* maka *Effective Tax Rate* yang terjadi di perusahaan akan meningkat sebesar 0,016.
4. Bersarnya nilai koefisien *Net profit Margin* (X_3) sebesar -0,872, hal ini menunjukan arah yang berlawan antara *Net Profit Margin* dan *Effective Tax Rate*, yang artinya setiap 1% kenaikan yang terjadi pada variabel *Net Profit Margin* maka *Effectif Tax Rate* akan mengalami penurunan sebesar -0,872.
5. Besarnya nilai koefisien *Current Ratio* (X_4) sebesar 0,006, hal ini menunjukan adanya perubahan searah antara *Current Ratio* denga *Effective Tax Rate*, dimana setiap 1% kenaikan yang terjadi pada variabel *Current Ratio* maka *Effective Tax Rate* akan mengalami kenaikan sebesar 0,006.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen berupa *Tax Avoidance*. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,419[a]	,175	,157	,13900
a. Predictors: (Constant), CURRENT RATIO, NPM, DER, DAR				

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji R^2 pada tabel 4.5, nilai *R Square* sebesar 0,175 menunjukan bahwa besar pengaruh terhadap *tax avoidance* yang menggunakan *effective tax rate,* yang ditimbulkan oleh variabel *debt to asset ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan current ratio* yaitu sebesar 17,5% % sedangkan besar pengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditimbulkan oleh faktor lain yaitu sebesar 82,5%. Dengan nilai *R square* yang kecil maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas.

4.1.5.2 Uji F Statistik

Nilai statistik F digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependennya degan tingkat signifikan yang digunakan yaitu α =5% atau 0,5. Hasil uji F statistic dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Uji F Statistik

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,739	4	,185	9,565	,000[b]
	Residual	3,478	180	,019		
	Total	4,217	184			
a. Dependent Variable: ETR						
b. Predictors: (Constant), CURRENT RATIO, NPM, DER, DAR						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji F diatas, nilai F hitung diketahui dalam kolom F sebesar 9,565 dengan nilai sig. sebesar 0,05. Sedangkan untuk menentukan nilai F tabel dengan menggunakan perhitungan f(k-1;n-k) = f(4-1;185-4) = f(3;181) = 2,65. Dari hasil F hitung dan F tabel yang diperoleh menunjukan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel (9,565 > 2,65), sedangkan nilai signifikansinya adalah 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Hal ini menunjukan bahwa variabel *debt to equity ratio, debt to asset ratio, net profit margin,* dan *current ratio* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang menggunakan variabel *effective tax rate.*

4.1.5.3 Uji T Statistik

Dalam penelitian ini, uji T statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji T satistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Uji T Statistik

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,316	,138		2,292	,023
	DAR	,051	,223	,051	,227	,821
	DER	,016	,030	,086	,540	,590
	NPM	-,871	,159	-,409	-5,463	,000
	CURRENT RATIO	,006	,012	,065	,460	,646
a. Dependent Variable: ETR						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji T diatas, dapat diketahui nilai T hitung yang diperoleh dari kolom T dan nilai signifikan yang diperoleh dari kolom sig. sedangkan nilai T tabel dalam penelitian ini dapat di hitung dengan cara t (a/2 ; (n-k)-1) = t (0,05/2 ; (185-4)-1) = t (0,025 ; 180) = 1,973.

Variabel *debt to asset* ratiodapat diketahui dari tabel diatas bahwa nilai sig. sebesar 0,821 lebih besar dari 0,05 (0,821>0,05) dan nilai T hitung sebesar 0,227 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,973 (0,227<1,973), sehingga dapat disimpulkan bahwa *debt to asset ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Variabel *debt to equity ratio* dapat diketahui dari tabel uji T statistik yang menyatakan bahwa nilai sig sebesar 0,590 lebih besar dari 0,05 (0,590>0,05) dan nilai T hitung sebesar 0,540 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,973 (0,590<1,973), sehingga dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance.*

Variabel *net profit margin* dapat diketahui dari tabel uji T statistik yang menyatakan bahwa nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05)

dan nilai T hitung sebesar 5,463 lebih besar dari T tabel sebesar 1,975 (5,463>1,973), sehingga dapat disimpulkan bahwa *net profit margin* berpengaruh negatf secara signifikan terhadap *tax avoidance.*

Variabel *current ratio* dapat diketahui dari tabel uji T statistik yang menyatakan bahwa nilai sig sebesar 0,646 lebih besar dari 0,05 (0,646>0,05) dan nilai T hitung sebesar 0,460 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,973 (0,460<1,971), sehingga dapat disimpulkan bahwa *current* tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance.*

4.2 **Pembahasan Penelitian**

4.2.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian berkaitan dengan pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance* menggunakan dua variabel yang menjadi variabel independen yaitu *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*. Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh *Debt to Asset Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis (uji t) pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} (0,227<1,973), adapun nilai signifakansi dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu (0,821>0,05). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh dari *debt to asset ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis pertama penelitian ini ditolak.

b. Pengaruh *Debt to Equity* Ratio terhadap T*ax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis (uji t) pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} (0,540<1,973), adapun nilai signifakansi dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu (0,590>0,05). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh dari *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

Struktur modal merupakan campuran atau proporsi antara hutang jangka panjang dan ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya. Kewajiban perusahaan terhadap utang jangka panjang yaitu membayar bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, dimana hak dari pemberi pinjaman (kreditur) harus didahulukan dibandingkan dengan para pemegang saham. Jika dikaitkan dengan perspektif islam, hasil penelitian tersebut berkaitan dengan QS : Al-Baqarah (2) : (280) berkaitan dengan hutang. Dalam islam hutang didefinisikan sebagi qardh sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.

Dari hasil penelitian uji T atas dua variabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika modal kerja pada perusahaan meningkat, hal ini tidak akan menjadikan peningkatan pada perusahaan dalam upaya untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh (Ali, 2020) yang menyatakan bahwa *Long Term Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indah dan Nita, 2019) yang menyatakan bahwa *laverage* yang menggunakan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap perencanaan perpajakan.

4.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian berkaitan dengan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yaitu dengan menggunakan variabel *net profit margin*, dengan hasil analisi uji T pada tabel 4.7 yang menyatakan bahwa nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} (-5,463>1,973), adapun nilai signifakansi dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu (0,00>0,05). Hal ini menunjukan bahwa

terdapat pengaruh net profit margin terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima

Profitabilitas menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan suatu keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan. Selain itu, dapat diprediksi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah tidak akan taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan asset perusahaan. Jika dikaitkan dengan perspektif islam, hasil penelitian tersebut berkaitan dengan QS : As-Syura : 20 yang memerintahkan untuk tidak mencari keuntungan di dunia saja, akan tetapi harus berupaya dan mencari keuntungan di akhirat.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa jika profit perusahaan meningkat maka upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak akan menurun. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Ari. dkk, 2019) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan (Lyandra dan Habibah, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.2.3 Pengaruh Likuiditas *Terhadap Tax Avoidance*

Penelitian berkaitan dengan pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* yaitu dengan menggunakan variabel *current ratio*, dengan hasil analisi uji T pada tabel 4.7 yang menyatakan bahwa nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} (0,646>0,05), adapun nilai signifakansi dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu (0,460<1,973). Hal ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh likuiditas terhadap perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hipotesis keempat penelitian ini ditolak.

Likuiditas dengan menggunakan variabel current ratio menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup hutang lancar dengan menggunakan asset lancar perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Suyanto dan Supramono, 2012). Jika dikaitkan dengan perspektif islam, hasil penelitian tersebut berkaitan dengan QS : Al – Maidah (5) : 2 berupa perintah untuk saling menolong dalam kebaikan, dimana ajaran islam memperbolehkan hutang karena hutang merupakan bagian dari tolong menolong sesama manusia. Akan tetapi dalam melakukan amalan hutang piutang terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan agar dapat membawa kita kepada syurganya Allah.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa jika kemampuan perusahaan dalam mengelola asset lancar meningkat maka upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak tidak meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Lyandra dan Habibah, 2021) yang menyatakan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan (Doni, 2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal menggunakan variabel *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio,* pengaruh profitabilitas menggunakan variable *net profit margin* dan pengaruh likuiditas menggunakan variabel *current ratio* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan data berupa data sekunder, dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian menganalisis data mengenai pengaruh struktur modal menggunakan variabel *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio,* pengaruh profitabilitas menggunakan variable *net profit margin* dan pengaruh likuiditas menggunakan variabel *current ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Debt to asset ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

b. *Debt to equity ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

c. *Net profit margin* secara parsial memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

d. *Current ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

e. Struktur modal menggunakan variabel *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio,* profitabilitas menggunakan variable *net profit margin,* dan likuiditas menggunakan variabel *current ratio* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor industry lain seperti perusahaan sektor pertambangan, pertanian, keuangan, telekomunikasi, dengan rentang periode penelitian yang berbeda untuk memperluas untuk memperluas jumlah sample yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga diarapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel independen lainnya seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Indah Rahmadini dan Nita Erika, 2019) untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi perusahaan dalam melakuan upaya penghindaran pajak *(tak avoidance)* untuk meminimalisir beban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ariawan, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 18 (3), 1831-1859.

Aisjah, S. (2012). *Strategi Diversifikasi Korporat Penciptaan Nilai Perusaan.* Malang: Universitas Brawijaya Press.

Al Hasan , F. A., & Iman, R. Q. (2017). Instrumen Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam. *Adliya*, 11 (2), 169 - 173.

Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 2 (1), 36.

Brigham, E., & Houston, J. (2019). *Fundamentals of Financial Management.* Boston : Cengage.

Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4 (1), 67.

Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Bisnis dan Manajemen* , 5 (2), 187 - 206.

Darmawan. (2020). *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan* . Yogyakarta: UNY Press.

Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 14 (3), 1584 -1613.

Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Kharisma*, 2 (1), 66 - 76.

DJP. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak.* Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.

Ekasari, K. (2014). HERMENEUTIKA LABA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5 (1), 72.

Fahmi, I. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan. Cetakan Ketiga* . Bandung : Alfabeta.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Hamdi, S. (2018). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Scientific Journal of Reflection*, 1 (4), 441 - 450.

Handayani, R. (2017). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yangListing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10 (1), 72 - 84.

Hardani, Auliya, N. H., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu .

Hermawan, A., & Yusran , H. L. (2017). *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif.* Jakarta: Kencana.

Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan.* Ponorogo: Uwais Inspira Indonesia .

Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1 (1), 147 - 167.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metode Penelitian Bisnis.* yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam.

Intan, D. A., & Sudiartha, G. M. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6 (4), 2230.

Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 7 (1), 85- 92.

Karmila. (2008). *Mengenal Perpajakan* . Klaten : Cempaka Putih .

Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Laksono, R. (2019). Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2015 – 2017. *Tirtayasa Ekonomika*, 14 (1), 26.

Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2013-2017. *Journal of Applied Business and Economic*, 5 (4), 301 -314.

Margie, L. A., & Habibah. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal Of Reflection*, 4 (1), 91 - 100.

Mustaqiem, D. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia.* Yogyakarta : Buku Litera Yogyakarta.

Pitoyo, M. M., & Lestari, H. S. (2018). Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia . *Jurnal manajemen Bisnis* , 13 (1), 81 - 106.

Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif* . Sidoarjo : Zifatama puvblishing.

Raharjaputra, H. S. (2009). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutif Perusahaan.* Jakarta: Salemba Empat.

Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jimameka*, 4 (1), 131-143.

Salamah., A., Pamungkas., M., & Yogi. K. (2016). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9 (2), 10.

Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPn.* Jakarta: Indeks.

Subagiastraa, K., Arizonab, I. E., Kusuma, I. N., & Mahaputra, A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* , 1 (2), 167 -193.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Indeks .

Warsono. (2003). *Manajemen Keuangan.* Malang: UMM Press.

Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan.* Bantul: Buku Pintar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel

NO	Kode Saham	Nama Emiten
1	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
2	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
4	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
5	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
6	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk
7	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
8	HMSP	PT H.M. Sampoerna Tbk
9	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
10	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
12	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
13	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
14	UNVR	PT Unilever Indonesia
15	CINT	PT Chitose International Tbk
16	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk
17	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
18	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
19	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
20	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
21	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
22	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk
23	INAI	PT Indal Alumunium Industry Tbk
24	LION	PT Lion Metal Works Tbk
25	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
26	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
27	INDS	PT Indospring Tbk
28	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
29	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
30	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk
31	TRIS	PT Trisula International Tbk
32	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk

NO	Kode Saham	Nama Emiten
33	JECC	PT Jombo Cable Company Tbk
34	KBLI	PT KMI Wire & Cable
35	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
36	VOKS	PT Voksel Electric Tbk
37	BATA	PT Sepatu Bata Tbk

Sumber : Data diolah, 2021

Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Variabel Dependen

Effective Tax Rate
Tahun 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	DLTA	2015	58.152.543	250.197.742	0,23
		2016	72.538.386	327.047.654	0,22
		2017	89.240.218	369.012.853	0,24
		2018	103.118.133	441.248.118	0,23
		2019	94.622.038	412.437.215	0,23
2	ICBP	2015	1.086.486	4.009.634	0,27
		2016	1.357.953	4.989.254	0,27
		2017	1.663.388	5.206.561	0,32
		2018	1.788.004	6.446.785	0,28
		2019	2.076.943	7.436.972	0,28
3	INDF	2015	2.532.747	4.962.084	0,51
		2016	2.532.747	7.385.228	0,34
		2017	2.497.558	7.594.822	0,33
		2018	2.485.115	7.446.966	0,33
		2019	2.846.668	8.749.397	0,33
4	MLBI	2015	178.663	675.572	0,26
		2016	338.057	1.320.186	0,26
		2017	457.953	1.780.020	0,26
		2018	447.105	1.671.912	0,27

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2019	420.553	1.626.612	0,26
5	ROTI	2015	107.712.914.648	378.251.615.088	0,28
		2016	89.639.472.867	369.416.841.698	0,24
		2017	50.783.313.391	186.147.334.530	0,27
		2018	59.764.888.552	186.936.324.915	0,32
		2019	110.580.263.193	347.098.820.613	0,32
6	ULTJ	2015	177.575.035.200	700.675.250.229	0,25
		2016	222.657.146.910	932.482.782.652	0,24
		2017	316.790	1.035.192	0,31
		2018	247.411	949.018	0,26
		2019	339.494	1.375.359	0,25
7	GGRM	2015	2.182.441	8.635.275	0,25
		2016	2.258.454	8.931.136	0,25
		2017	2.681.165	10.436.512	0,26
		2018	2.686.174	10.479.242	0,26
		2019	3.607.032	14.487.736	0,25
8	HMSP	2015	3.569.336	13.932.644	0,26
		2016	4.249.218	17.011.447	0,25
		2017	4.224.272	16.894.806	0,25
		2018	4.422.851	17.961.269	0,25
		2019	4.537.910	18.259.423	0,25
9	DVLA	2015	36.543.278	144.437.708	0,25

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2016	62.333.656	214.417.056	0,29
		2017	63.898.628	226.147.921	0,28
		2018	72.191.936	272.843.904	0,26
		2019	79.466.786	301.250.035	0,26
10	KAEF	2015	8.935.497.378	354.904.735.867	0,03
		2016	111.427.977.007	383.025.924.670	0,29
		2017	118.001.844.961	449.709.762.422	0,26
		2018	175.933.518.563	577.726.327.511	0,30
		2019	22.425.049	38.315.488	0,59
11	KLBF	2015	663.186.962.586	2.720.881.244.459	0,24
		2016	740.303.526.679	3.091.188.460.230	0,24
		2017	787.935.315.388	3.241.186.725.992	0,24
		2018	809.137.704.264	3.306.399.669.021	0,24
		2019	865.015.000.888	3.402.616.824.533	0,25
12	TSPC	2015	177.892.281.060	707.110.932.867	0,25
		2016	173.464.664.107	718.958.200.369	0,24
		2017	186.750.680.877	744.090.262.873	0,25
		2018	187.322.033.018	727.700.178.905	0,26
		2019	201.065.998.598	796.220.911.472	0,25
13	TCID	2015	38.647.669.480	583.121.947.494	0,07
		2016	59.416.261.296	221.475.857.643	0,27
		2017	63.956.663.719	243.083.045.787	0,26

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2018	61.576.511.908	234.625.954.664	0,26
		2019	55.843.013.533	200.992.358.094	0,28
14	UNVR	2015	1.977.685	7.829.490	0,25
		2016	2.181.213	8.571.885	0,25
		2017	2.367.099	9.371.661	0,25
		2018	3.076.319	12.185.764	0,25
		2019	2.508.935	9.901.772	0,25
15	CINT	2015	11.284.522.975	40.762.330.489	0,28
		2016	7.553.603.434	28.172.913.292	0,27
		2017	8.670.611.306	38.318.872.398	0,23
		2018	8.535.926.795	22.090.078.956	0,39
		2019	6.675.284.777	13.896.350.693	0,48
16	WTON	2015	27.749.539.294	199.533.561.064	0,14
		2016	58.691.974.024	340.259.601.398	0,17
		2017	79.042.760.767	419.501.620.159	0,19
		2018	132.611.129.232	619.251.303.685	0,21
		2019	115.558.811.307	626.270.544.710	0,18
17	ARNA	2015	24.304.373.076	95.514.316.424	0,25
		2016	32.462.388.949	123.838.299.924	0,26
		2017	44.020.031.391	166.203.941.034	0,26
		2018	53.522.141.574	211.729.940.176	0,25
		2019	73.932.125.865	291.607.365.374	0,25

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
18	TOTO	2015	96.337.115.958	381.573.896.617	0,25
		2016	82.756.308.203	251.320.891.921	0,33
		2017	98.725.062.966	377.660.867.510	0,26
		2018	105.305.767.799	451.998.563.901	0,23
		2019	44.881.804.398	185.479.305.285	0,24
19	AKPI	2015	23.494.252	51.138.966	0,46
		2016	23.558.754	75.952.611	0,31
		2017	18.479.528	31.813.498	0,58
		2018	27.460.619	91.686.890	0,30
		2019	24.146.137	78.501.405	0,31
20	TALF	2015	9.828.982.966	43.546.708.946	0,23
		2016	10.908.035.858	41.045.743.182	0,27
		2017	10.488.314.450	31.954.151.234	0,33
		2018	16.889.494.487	60.866.228.487	0,28
		2019	12.073.616.141	39.529.863.107	0,31
21	EKAD	2015	19.266.661.660	66.306.918.116	0,29
		2016	27.763.208.449	118.449.029.979	0,23
		2017	26.453.643.952	102.649.309.681	0,26
		2018	27.410.228.138	101.455.415.901	0,27
		2019	34.431.929.404	111.834.501.956	0,31
22	INCI	2015	2.259.981.843	19.220.641.866	0,12
		2016	3.305.911.836	13.294.748.095	0,25

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2017	5.523.195.214	22.077.467.345	0,25
		2018	5.364.743.569	22.040.417.272	0,24
		2019	4.225.326.149	18.037.062.772	0,23
23	INAI	2015	28.498.388.713	57.114.061.880	0,50
		2016	22.544.497.747	58.097.472.991	0,39
		2017	13.640.368.683	52.292.073.203	0,26
		2018	24.293.955.742	64.757.097.094	0,38
		2019	14.558.321.695	48.116.436.880	0,30
24	LION	2015	12.433.164.026	58.451.801.513	0,21
		2016	12.325.977.643	54.671.394.698	0,23
		2017	10.892.495.785	20.175.438.794	0,54
		2018	9.228.951.178	23.908.625.171	0,39
		2019	4.836.925.088	5.763.388.287	0,84
25	CPIN	2015	449.030	2.281.628	0,20
		2016	1.731.848	3.957.250	0,44
		2017	759.947	3.259.822	0,23
		2018	1.355.866	5.907.351	0,23
		2019	963.064	4.595.238	0,21
26	AUTO	2015	110.895	433.596	0,26
		2016	165.486	648.907	0,26
		2017	164.155	711.936	0,23
		2018	180.762	861.563	0,21

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2019	266.349	1.119.858	0,24
27	INDS	2015	2.200.387.443	4.134.206.595	0,53
		2016	10.583.748.495	60.140.115.829	0,18
		2017	46.701.314.660	160.340.854.561	0,29
		2018	37.295.885.405	147.982.768.771	0,25
		2019	28.605.311.394	130.070.871.745	0,22
28	SMSM	2015	122.410	583.717	0,21
		2016	156.016	658.208	0,24
		2017	16.525	720.638	0,02
		2018	194.731	828.281	0,24
		2019	183.366	822.042	0,22
29	RICY	2015	8.932.127.892	22.397.841.356	0,40
		2016	9.329.017.013	23.362.443.532	0,40
		2017	9.250.283.887	25.808.846.585	0,36
		2018	11.361.489.897	29.841.866.355	0,38
		2019	11.614.850.360	28.833.894.902	0,40
30	STAR	2015	2.339.678.558	2.646.564.128	0,88
		2016	5.466.959.514	5.929.514.821	0,92
		2017	4.163.674.800	4.758.401.598	0,88
		2018	5.856.185.860	6.029.776.900	0,97
		2019	4.818.501.423	6.769.612.827	0,71
31	TRIS	2015	12.720.908.918	50.169.354.682	0,25

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2016	22.734.275.933	47.947.291.257	0,47
		2017	7.635.098.236	21.833.987.786	0,35
		2018	4.640.547.008	24.305.621.702	0,19
		2019	22.463.824.024	45.700.722.214	0,49
32	UNIT	2015	1.275.438.361	1.661.391.489	0,77
		2016	1.054.706.173	1.915.481.904	0,55
		2017	477.304.066	1.539.428.122	0,31
		2018	247.549.814	754.073.589	0,33
		2019	196.338.580	873.313.835	0,22
33	JECC	2015	6.031.664	8.496.333	0,71
		2016	43.002.354	175.425.515	0,25
		2017	28.268.246	111.623.616	0,25
		2018	33.619.690	122.048.569	0,28
		2019	42.452.569	144.970.437	0,29
34	KBLI	2015	34.677.927.328	150.049.026.298	0,23
		2016	51.790.904.893	386.129.743.485	0,13
		2017	69.910.827.751	428.884.879.225	0,16
		2018	73.326.145.035	308.977.208.238	0,24
		2019	104.129.916.704	499.080.077.892	0,21
35	KBLM	2015	8.712.277.887	21.472.643.499	0,41
		2016	14.689.067.757	34.528.844.006	0,43
		2017	553.314.951	44.548.264.596	0,01

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
		2018	23.833.338.586	64.508.435.214	0,37
		2019	10.183.374.385	48.831.643.532	0,21
36	VOKS	2015	2.116.345.815	2.393.453.781	0,88
		2016	64.297.950.713	224.343.824.106	0,29
		2017	64.037.702.240	230.242.661.579	0,28
		2018	36.521.210.266	141.989.954.853	0,26
		2019	50.697.996.282	258.947.121.683	0,20
37	BATA	2015	12.924.797	142.444.243	0,09
		2016	23.070.359	65.302.022	0,35
		2017	25.869.803	79.524.179	0,33
		2018	24.933.238	92.878.105	0,27
		2019	12.416.475	35.857.813	0,35

Sumber : Data diolah, 2021

Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Variabel Independen

Debt to Asset Ratio

Tahun 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
1	DLTA	2015	188.700.435	1.038.321.916	0,18
		2016	185.422.642	1.197.796.650	0,15
		2017	196.197.372	1.340.842.765	0,15
		2018	239.353.356	1.523.517.170	0,16
		2019	212.420.390	1.425.983.722	0,15
2	ICBP	2015	10.173.713	26.560.624	0,38
		2016	10.401.125	28.901.948	0,36
		2017	11.295.184	31.619.514	0,36
		2018	11.660.003	34.367.153	0,34
		2019	12.038.210	38.709.314	0,31
3	INDF	2015	48.709.933	91.831.526	0,53
		2016	38.233.092	82.174.515	0,47
		2017	41.298.111	88.400.877	0,47
		2018	46.620.996	96.537.796	0,48
		2019	41.996.071	96.198.559	0,44
4	MLBI	2015	1.334.373	2.100.853	0,64
		2016	1.454.398	2.275.038	0,64
		2017	1.445.173	2.510.078	0,58
		2018	1.721.965	2.889.501	0,60

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2019	1.750.943	2.896.950	0,60
5	ROTI	2015	1.517.788.685.162	2.706.323.637.034	0,56
		2016	1.476.889.086.692	2.919.640.858.718	0,51
		2017	1.739.467.993.982	4.559.573.709.411	0,38
		2018	1.476.909.260.772	4.393.810.380.883	0,34
		2019	1.589.486.465.854	4.682.083.844.951	0,34
6	ULTJ	2015	742.490.216.326	3.539.995.910.248	0,21
		2016	749.966.146.582	4.239.199.641.365	0,18
		2017	978.185	5.175.896	0,19
		2018	780.915	5.555.871	0,14
		2019	953.283	6.608.422	0,14
7	GGRM	2015	25.497.504	63.505.413	0,40
		2016	23.387.406	62.951.634	0,37
		2017	24.572.266	66.759.930	0,37
		2018	23.963.934	69.097.219	0,35
		2019	27.716.516	78.647.274	0,35
8	HMSP	2015	5.994.664	38.010.724	0,16
		2016	8.333.263	42.508.277	0,20
		2017	9.028.078	43.141.063	0,21
		2018	11.244.167	46.602.420	0,24
		2019	15.223.076	50.902.806	0,30
9	DVLA	2015	402.760.903	1.376.278.237	0,29

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2016	451.785.946	1.531.365.558	0,30
		2017	524.586.078	1.640.886.147	0,32
		2018	482.559.876	1.682.821.739	0,29
		2019	523.881.726	1.829.960.714	0,29
10	KAEF	2015	1.378.319.672.511	3.434.879.313.035	0,40
		2016	2.341.155.131.870	4.612.562.541.064	0,51
		2017	3.523.628.217.406	6.096.148.972.533	0,58
		2018	6.103.967.587.830	9.460.427.317.681	0,65
		2019	10.939.950.304	18.352.877.132	0,60
11	KLBF	2015	2.758.131.396.170	13.696.417.381.439	0,20
		2016	2.762.162.069.572	15.226.009.210.657	0,18
		2017	2.722.207.633.646	16.616.239.416.335	0,16
		2018	2.851.611.349.015	18.146.206.145.369	0,16
		2019	3.559.144.386.553	20.264.726.862.584	0,18
12	TSPC	2015	1.947.588.124.083	6.284.729.099.203	0,31
		2016	1.950.534.206.746	6.585.807.349.438	0,30
		2017	2.352.891.899.876	7.434.900.309.021	0,32
		2018	2.437.126.989.832	7.869.975.060.326	0,31
		2019	2.581.733.610.850	8.372.769.580.743	0,31
13	TCID	2015	367.225.370.670	2.082.096.848.703	0,18
		2016	401.942.530.776	2.185.101.038.101	0,18
		2017	503.480.853.006	2.361.807.189.430	0,21

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2018	472.680.346.662	2.445.143.511.801	0,19
		2019	532.048.803.777	2.551.192.620.939	0,21
14	UNVR	2015	10.902.585	15.367.509	0,71
		2016	12.041.437	16.745.695	0,72
		2017	13.733.025	18.906.413	0,73
		2018	11.944.837	19.522.970	0,61
		2019	15.367.509	20.649.371	0,74
15	CINT	2015	67.734.182.851	382.807.494.765	0,18
		2016	72.906.787.680	399.336.626.636	0,18
		2017	94.304.081.659	476.577.841.605	0,20
		2018	102.703.457.308	491.382.035.136	0,21
		2019	131.822.380.207	521.493.784.876	0,25
16	WTON	2015	2.192.672.341.480	4.456.097.502.804	0,49
		2016	2.171.844.871.662	4.662.319.785.317	0,47
		2017	4.320.040.760.957	7.067.976.095.043	0,61
		2018	5.744.966.289.467	8.881.778.299.672	0,65
		2019	6.829.449.147.200	10.337.895.087.207	0,66
17	ARNA	2015	536.050.998.398	1.430.779.475.454	0,37
		2016	595.128.097.887	1.543.216.299.146	0,39
		2017	571.946.769.034	1.601.346.561.573	0,36
		2018	556.309.556.626	1.652.905.985.730	0,34
		2019	622.355.306.743	1.799.137.069.343	0,35

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
18	TOTO	2015	947.997.940.099	2.439.540.859.205	0,39
		2016	1.057.566.418.720	2.581.440.938.262	0,41
		2017	1.132.699.218.954	2.826.490.815.501	0,40
		2018	967.642.637.307	2.897.119.790.004	0,33
		2019	994.204.688.438	2.918.467.252.139	0,34
19	AKPI	2015	1.775.577.239	2.883.143.132	0,62
		2016	1.495.874.021	2.615.909.190	0,57
		2017	1.618.713.342	2.745.325.833	0,59
		2018	1.836.576.739	3.070.410.492	0,60
		2019	1.531.819.965	2.776.775.756	0,55
20	TALF	2015	84.008.353.472	434.210.376.664	0,19
		2016	129.777.537.129	881.673.021.959	0,15
		2017	155.076.156.734	921.240.988.517	0,17
		2018	176.218.785.183	984.597.771.989	0,18
		2019	320.791.791.518	1.329.083.050.439	0,24
21	EKAD	2015	97.730.178.889	389.691.595.500	0,25
		2016	110.503.822.983	702.508.630.708	0,16
		2017	133.949.920.707	796.767.646.172	0,17
		2018	128.684.953.153	853.267.454.400	0,15
		2019	115.690.798.743	968.234.349.565	0,12
22	INCI	2015	15.494.757.317	169.546.066.314	0,09
		2016	26.524.918.593	269.351.381.344	0,10

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2017	35.408.565.186	303.788.390.330	0,12
		2018	71.410.278.158	391.362.697.956	0,18
		2019	65.323.258.479	405.445.049.452	0,16
23	INAI	2015	1.090.438.393.880	1.330.259.296.537	0,82
		2016	1.081.015.810.782	1.339.032.413.455	0,81
		2017	936.511.874.370	1.213.916.545.120	0,77
		2018	1.096.799.666.849	1.400.683.598.096	0,78
		2019	893.625.998.063	1.212.894.403.676	0,74
24	LION	2015	184.730.654.202	639.330.150.373	0,29
		2016	215.209.902.816	685.812.995.987	0,31
		2017	229.630.859.719	681.937.947.736	0,34
		2018	221.022.066.026	696.192.628.101	0,32
		2019	219.318.262.582	688.017.892.312	0,32
25	CPIN	2015	12.129.993	24.916.656	0,49
		2016	10.047.751	24.204.994	0,42
		2017	8.822.202	24.532.331	0,36
		2018	8.253.944	27.645.118	0,30
		2019	8.281.441	29.353.041	0,28
26	AUTO	2015	4.195.684	14.339.110	0,29
		2016	4.075.716	14.612.274	0,28
		2017	4.003.233	14.762.309	0,27
		2018	4.626.013	15.889.648	0,29

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2019	4.365.175	16.015.709	0,27
27	INDS	2015	634.889.428.231	2.553.928.346.219	0,25
		2016	409.208.624.907	2.477.272.502.538	0,17
		2017	289.798.419.319	2.434.617.337.849	0,12
		2018	288.105.732.114	2.482.337.567.967	0,12
		2019	262.135.613.148	2.834.422.741.208	0,09
28	SMSM	2015	779.860	2.220.108	0,35
		2016	674.685	2.254.740	0,30
		2017	615.157	2.443.341	0,25
		2018	650.926	2.801.203	0,23
		2019	664.678	3.106.981	0,21
29	RICY	2015	798.114.824.380	1.198.193.867.892	0,67
		2016	876.184.855.001	1.288.683.925.066	0,68
		2017	944.179.416.586	1.374.444.788.282	0,69
		2018	1.094.692.568.786	1.539.602.054.832	0,71
		2019	1.162.598.358.789	1.619.854.736.252	0,72
30	STAR	2015	239.344.544.398	729.020.553.284	0,33
		2016	200.161.402.637	690.187.353.961	0,29
		2017	124.422.750.504	614.705.038.056	0,20
		2018	124.601.429.706	615.956.006.710	0,20
		2019	89.794.451.847	579.813.156.839	0,15
31	TRIS	2015	245.138.356.170	574.346.433.075	0,43

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2016	293.073.984.034	639.701.164.511	0,46
		2017	188.736.733.204	544.968.319.987	0,35
		2018	276.789.437.347	633.014.281.325	0,44
		2019	486.632.660.751	1.147.246.311.331	0,42
32	UNIT	2015	217.565.067.467	460.539.382.206	0,47
		2016	188.891.359.541	432.913.180.372	0,44
		2017	181.126.294.572	426.384.622.878	0,42
		2018	173.753.567.079	419.701.649.147	0,41
		2019	171.001.165.161	417.735.266.590	0,41
33	JECC	2015	990.707.822	1.358.464.081	0,73
		2016	1.116.872.234	1.587.210.576	0,70
		2017	1.380.623.870	1.927.985.352	0,72
		2018	1.472.379.829	2.081.620.993	0,71
		2019	1.132.622.125	1.888.753.850	0,60
34	KBLI	2015	524.437.909.934	1.551.799.840.976	0,34
		2016	550.076.575.595	1.871.422.416.044	0,29
		2017	1.227.014.231.702	3.013.760.616.985	0,41
		2018	1.213.840.888.147	3.244.821.647.076	0,37
		2019	1.174.014.083.315	3.556.474.711.037	0,33
35	KBLM	2015	357.910.337.055	654.385.717.061	0,55
		2016	318.436.089.653	639.091.366.917	0,50
		2017	443.770.270.269	1.235.198.847.468	0,36

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	DAR
		2018	476.887.194.322	1.298.358.478.375	0,37
		2019	436.010.329.994	1.284.437.358.420	0,34
36	VOKS	2015	1.026.591.706.684	1.536.244.634.556	0,67
		2016	999.166.542.590	1.668.210.094.478	0,60
		2017	1.296.044.190.202	2.110.166.496.595	0,61
		2018	1.562.752.955.234	2.485.382.578.010	0,63
		2019	1.918.323.973.420	3.027.942.155.357	0,63
37	BATA	2015	248.070.766	795.257.974	0,31
		2016	247.587.638	804.742.917	0,31
		2017	276.382.503	855.691.231	0,32
		2018	240.048.866	876.856.225	0,27
		2019	209.895.228	863.146.554	0,24

Sumber : Data diolah, 2021

Debt to Equity Ratio

tahun 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
1	DLTA	2015	188.700.435	849.621.481	0,22
		2016	185.422.642	1.012.374.008	0,18
		2017	196.197.372	1144645393	0,17
		2018	239.353.356	1284163814	0,19
		2019	212.420.390	1213563332	0,18
2	ICBP	2015	10.173.713	16.386.911	0,62
		2016	10.401.125	18.500.823	0,56
		2017	11.295.184	20.324.330	0,56
		2018	11.660.003	22.707.150	0,51
		2019	12.038.210	26.671.104	0,45
3	INDF	2015	48.709.933	43.121.593	1,13
		2016	38.233.092	43.941.423	0,87
		2017	41.298.111	47.102.766	0,88
		2018	46.620.996	49.916.800	0,93
		2019	41.996.071	54.202.488	0,77
4	MLBI	2015	1.334.373	766.480	1,74
		2016	1.454.398	820.640	1,77
		2017	1.445.173	1.064.905	1,36
		2018	1.721.965	1.167.536	1,47
		2019	1.750.943	1.146.007	1,53

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
5	ROTI	2015	1.517.788.685.162	1.188.534.951.872	1,28
		2016	1.476.889.086.692	1.442.751.772.026	1,02
		2017	1.739.467.993.982	2.820.105.715.429	0,62
		2018	1.476.909.260.772	2.916.901.120.111	0,51
		2019	1.589.486.465.854	3.092.597.379.097	0,51
6	ULTJ	2015	742.490.216.326	2.797.505.693.922	0,27
		2016	749.966.146.582	3.489.233.494.783	0,21
		2017	978.185	4.197.711	0,23
		2018	780.915	4.774.956	0,16
		2019	953.283	5.655.139	0,17
7	GGRM	2015	25.497.504	38.007.909	0,67
		2016	23.387.406	39.564.228	0,59
		2017	24.572.266	42.187.664	0,58
		2018	23.963.934	45.133.285	0,53
		2019	27.716.516	50.930.758	0,54
8	HMSP	2015	5.994.664	32.016.060	0,19
		2016	8.333.263	34.175.014	0,24
		2017	9.028.078	34.112.985	0,26
		2018	11.244.167	35.358.253	0,32
		2019	15.223.076	35.679.730	0,43
9	DVLA	2015	402.760.903	973.517.334	0,41
		2016	451.785.946	1.079.579.612	0,42

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
		2017	524.586.078	1.116.300.069	0,47
		2018	482.559.876	1.200.261.863	0,40
		2019	523.881.726	1.306.078.988	0,40
10	KAEF	2015	1.378.319.672.511	2.056.559.640.524	0,67
		2016	2.341.155.131.870	2.271.407.409.194	1,03
		2017	3.523.628.217.406	2.572.520.755.127	1,37
		2018	6.103.967.587.830	3.356.459.729.851	1,82
		2019	10.939.950.304	7.412.926.828	1,48
11	KLBF	2015	2.758.131.396.170	10.938.285.985.269	0,25
		2016	2.762.162.069.572	12.463.847.141.085	0,22
		2017	2.722.207.633.646	13.894.031.782.689	0,20
		2018	2.851.611.349.015	15.294.594.796.354	0,19
		2019	3.559.144.386.553	16.705.582.476.031	0,21
12	TSPC	2015	1.947.588.124.083	4.337.140.975.120	0,45
		2016	1.950.534.206.746	4.635.273.142.692	0,42
		2017	2.352.891.899.876	5.082.008.409.145	0,46
		2018	2.437.126.989.832	5.432.848.070.494	0,45
		2019	2.581.733.610.850	5.791.035.969.893	0,45
13	TCID	2015	367.225.370.670	1.714.871.478.033	0,21
		2016	401.942.530.776	1.783.158.507.325	0,23
		2017	503.480.853.006	1.858.326.336.424	0,27
		2018	472.680.346.662	1.972.463.165.139	0,24

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
		2019	532.048.803.777	2.019.143.817.162	0,26
14	UNVR	2015	10.902.585	4.827.360	2,26
		2016	12.041.437	4.704.258	2,56
		2017	13.733.025	5.173.388	2,65
		2018	11.944.837	7.578.133	1,58
		2019	15.367.509	5.281.862	2,91
15	CINT	2015	67.734.182.851	315.073.311.914	0,21
		2016	72.906.787.680	326.429.838.956	0,22
		2017	94.304.081.659	382.273.759.946	0,25
		2018	102.703.457.308	388.678.577.828	0,26
		2019	131.822.380.207	389.671.404.669	0,34
16	WTON	2015	2.192.672.341.480	2.263.425.161.324	0,97
		2016	2.171.844.871.662	2.490.474.913.655	0,87
		2017	4.320.040.760.957	2.747.935.334.086	1,57
		2018	5.744.966.289.467	3.136.812.010.205	1,83
		2019	6.829.449.147.200	3.508.445.940.007	1,95
17	ARNA	2015	536.050.998.398	894.728.477.056	0,60
		2016	595.128.097.887	948.088.201.259	0,63
		2017	571.946.769.034	1.029.399.792.539	0,56
		2018	556.309.556.626	1.096.596.429.104	0,51
		2019	622.355.306.743	1.176.781.762.600	0,53
18	TOTO	2015	947.997.940.099	1.491.542.919.106	0,64

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
		2016	1.057.566.418.720	1.523.847.519.542	0,69
		2017	1.132.699.218.954	1.693.791.596.547	0,67
		2018	967.642.637.307	1.929.477.152.737	0,50
		2019	994.204.688.438	1.924.262.563.701	0,52
19	AKPI	2015	1.775.577.239	1.107.565.893	1,60
		2016	1.495.874.021	1.120.035.169	1,34
		2017	1.618.713.342	1.126.612.491	1,44
		2018	1.836.576.739	1.233.833.753	1,49
		2019	1.531.819.965	1.244.955.791	1,23
20	TALF	2015	84.008.353.472	350.202.023.192	0,24
		2016	129.777.537.129	751.895.484.830	0,17
		2017	155.076.156.734	766.164.831.783	0,20
		2018	176.218.785.183	808.378.986.806	0,22
		2019	320.791.791.518	1.008.291.258.921	0,32
21	EKAD	2015	97.730.178.889	291.961.416.611	0,33
		2016	110.503.822.983	592.004.807.725	0,19
		2017	133.949.920.707	662.817.725.465	0,20
		2018	128.684.953.153	724.582.501.247	0,18
		2019	115.690.798.743	852.543.550.822	0,14
22	INCI	2015	15.494.757.317	154.051.308.997	0,10
		2016	26.524.918.593	242.826.462.751	0,11
		2017	35.408.565.186	268.379.825.144	0,13

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
		2018	71.410.278.158	319.952.419.798	0,22
		2019	65.323.258.479	340.121.790.973	0,19
23	INAI	2015	1.090.438.393.880	239.820.902.657	4,55
		2016	1.081.015.810.782	258.016.602.673	4,19
		2017	936.511.874.370	277.404.670.750	3,38
		2018	1.096.799.666.849	303.883.931.247	3,61
		2019	893.625.998.063	319.268.405.613	2,80
24	LION	2015	184.730.654.202	454.599.496.171	0,41
		2016	215.209.902.816	470.603.093.171	0,46
		2017	229.630.859.719	452.307.088.017	0,51
		2018	221.022.066.026	475.170.562.075	0,47
		2019	219.318.262.582	468.699.629.730	0,47
25	CPIN	2015	12.129.993	12.786.663	0,95
		2016	10.047.751	14.157.243	0,71
		2017	8.822.202	15.710.129	0,56
		2018	8.253.944	19.391.174	0,43
		2019	8.281.441	21.071.600	0,39
26	AUTO	2015	4.195.684	10.143.426	0,41
		2016	4.075.716	10.536.558	0,39
		2017	4.003.233	10.759.076	0,37
		2018	4.626.013	11.263.635	0,41
		2019	4.365.175	11.650.534	0,37

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
27	INDS	2015	634.889.428.231	1.919.038.917.988	0,33
		2016	409.208.624.907	2.068.063.877.631	0,20
		2017	289.798.419.319	2.144.818.918.530	0,14
		2018	288.105.732.114	2.194.231.835.853	0,13
		2019	262.135.613.148	2.572.287.128.060	0,10
28	SMSM	2015	779.860	1.440.248	0,54
		2016	674.685	1.580.055	0,43
		2017	615.157	1.828.184	0,34
		2018	650.926	2.150.277	0,30
		2019	664.678	2.442.303	0,27
29	RICY	2015	798.114.824.380	400.079.043.512	1,99
		2016	876.184.855.001	412.499.070.065	2,12
		2017	944.179.416.586	430.265.371.696	2,19
		2018	1.094.692.568.786	444.909.486.046	2,46
		2019	1.162.598.358.789	457.256.377.463	2,54
30	STAR	2015	239.344.544.398	489.676.008.886	0,49
		2016	200.161.402.637	490.025.951.324	0,41
		2017	124.422.750.504	490.282.287.552	0,25
		2018	124.601.429.706	491.354.577.004	0,25
		2019	89.794.451.847	490.018.704.992	0,18
31	TRIS	2015	245.138.356.170	329.208.076.905	0,74
		2016	293.073.984.034	346.627.180.477	0,85

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
		2017	188.736.733.204	356.231.586.783	0,53
		2018	276.789.437.347	356.224.843.978	0,78
		2019	486.632.660.751	660.613.650.580	0,74
32	UNIT	2015	217.565.067.467	242.974.314.739	0,90
		2016	188.891.359.541	244.021.820.831	0,77
		2017	181.126.294.572	245.258.328.306	0,74
		2018	173.753.567.079	245.948.082.068	0,71
		2019	171.001.165.161	246.734.101.429	0,69
33	JECC	2015	990.707.822	367.756.259	2,69
		2016	1.116.872.234	470.338.342	2,37
		2017	1.380.623.870	547.361.482	2,52
		2018	1.472.379.829	609.241.164	2,42
		2019	1.132.622.125	756.131.725	1,50
34	KBLI	2015	524.437.909.934	1.027.361.931.042	0,51
		2016	550.076.575.595	1.321.345.840.449	0,42
		2017	1.227.014.231.702	1.786.746.385.283	0,69
		2018	1.213.840.888.147	2.030.980.758.929	0,60
		2019	1.174.014.083.315	2.382.460.627.722	0,49
35	KBLM	2015	357.910.337.055	296.475.380.006	1,21
		2016	318.436.089.653	320.655.277.264	0,99
		2017	443.770.270.269	791.428.577.199	0,56
		2018	476.887.194.322	821.471.284.053	0,58

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Hutang	Modal Sendiri	DER
		2019	436.010.329.994	848.427.028.426	0,51
36	VOKS	2015	1.026.591.706.684	509.652.927.872	2,01
		2016	999.166.542.590	669.043.551.888	1,49
		2017	1.296.044.190.202	814.122.306.393	1,59
		2018	1.562.752.955.234	922.629.622.776	1,69
		2019	1.918.323.973.420	1.109.618.181.937	1,73
37	BATA	2015	248.070.766	547.187.208	0,45
		2016	247.587.638	557.155.279	0,44
		2017	276.382.503	579.308.728	0,48
		2018	240.048.866	636.807.359	0,38
		2019	209.895.228	653.251.326	0,32

Sumber : Data diolah, 2021

Net Profit Margin

Tahun 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
1	DLTA	2015	192.045.199	1.573.137.749	0,12
		2016	254.509.268	1.658.618.899	0,15
		2017	279.772.635	777.308.328	0,36
		2018	338.129.985	893.006.350	0,38
		2019	317.815.177	827.136.727	0,38
2	ICBP	2015	2.923.148	31.741.094	0,09
		2016	3.631.301	34.466.069	0,11
		2017	3.543.173	35.606.593	0,10
		2018	4.658.781	38.413.407	0,12
		2019	5.360.029	42.296.703	0,13
3	INDF	2015	3.709.501	64.061.947	0,06
		2016	5.266.906	66.750.317	0,08
		2017	5.097.264	70.186.618	0,07
		2018	4.961.851	73.394.728	0,07
		2019	5.902.729	76.592.955	0,08
4	MLBI	2015	503.624	2.696.318	0,19
		2016	97.953	3.263.311	0,03
		2017	1.322.067	3.389.736	0,39
		2018	1.224.807	3.649.615	0,34
		2019	1.206.059	3.711.405	0,32

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
5	ROTI	2015	270.538.700.440	2.174.501.712.899	0,12
		2016	279.777.368.831	2.521.920.968.213	0,11
		2017	135.364.021.139	2.491.100.179.560	0,05
		2018	127.171.436.363	2.766.545.866.684	0,05
		2019	236.518.557.420	3.337.022.314.624	0,07
6	ULTJ	2015	523.100.215.029	4.393.932.684.171	0,12
		2016	709.825.635.742	4.685.987.917.355	0,15
		2017	718.402	4.879.559	0,15
		2018	701.607	5.472.882	0,13
		2019	1.035.865	6.241.419	0,17
7	GGRM	2015	10.064.867	70.365.573	0,14
		2016	10.122.038	76.274.147	0,13
		2017	7.755.347	83.305.925	0,09
		2018	7.793.068	95.707.663	0,08
		2019	10.880.704	110.523.819	0,10
8	HMSP	2015	10.363.308	89.069.306	0,12
		2016	12.762.229	95.466.657	0,13
		2017	12.670.534	99.091.484	0,13
		2018	13.538.418	106.741.891	0,13
		2019	13.721.513	106.055.176	0,13
9	DVLA	2015	107.894.430	1.306.098.136	0,08
		2016	152.083.400	1.451.356.680	0,10

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
		2017	162.249.293	1.575.647.308	0,10
		2018	200.651.968	1.699.657.296	0,12
		2019	221.783.249	1.813.020.278	0,12
10	KAEF	2015	265.549.762.083	4.860.371.483.524	0,05
		2016	271.597.947.663	5.811.502.656.431	0,05
		2017	331.707.917.461	6.127.479.369.403	0,05
		2018	401.792.808.948	7.454.114.741.189	0,05
		2019	15.890.439	9.400.535.476	0,00
11	KLBF	2015	2.057.694.281.873	17.887.464.223.321	0,12
		2016	2.350.884.933.551	19.374.230.957.505	0,12
		2017	2.453.251.410.604	20.182.120.166.616	0,12
		2018	2.497.261.964.757	21.074.306.186.027	0,12
		2019	2.537.601.823.645	22.633.476.361.038	0,11
12	TSPC	2015	529.218.651.807	8.181.481.867.179	0,06
		2016	545.493.536.262	9.138.238.993.842	0,06
		2017	557.339.581.996	9.565.462.045.199	0,06
		2018	540.378.145.887	10.088.118.830.780	0,05
		2019	595.154.912.874	10.993.842.057.747	0,05
13	TCID	2015	544.474.278.014	2.314.889.854.074	0,24
		2016	162.059.596.347	2.526.776.164.168	0,06
		2017	179.126.382.068	2.706.394.847.919	0,07
		2018	173.049.442.756	2.648.754.344.347	0,07

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
		2019	145.149.344.561	2.804.151.670.769	0,05
14	UNVR	2015	5.851.805	36.484.030	0,16
		2016	6.390.672	40.053.732	0,16
		2017	7.004.562	41.204.510	0,17
		2018	9.109.445	41.802.073	0,22
		2019	7.392.837	42.922.563	0,17
15	CINT	2015	29.477.807.514	315.229.890.328	0,09
		2016	20.619.309.858	327.426.146.630	0,06
		2017	29.648.261.092	373.955.852.243	0,08
		2018	13.554.152.161	370.390.736.433	0,04
		2019	7.221.065.916	411.783.279.013	0,02
16	WTON	2015	171.784.021.770	2.652.622.140.207	0,06
		2016	281.567.627.374	3.481.731.506.128	0,08
		2017	340.458.859.392	5.362.263.237.778	0,06
		2018	486.640.174.453	6.930.628.258.854	0,07
		2019	510.711.733.403	7.083.384.467.587	0,07
17	ARNA	2015	71.209.943.348	1.291.926.384.471	0,06
		2016	91.375.910.975	1.511.978.367.218	0,06
		2017	122.183.909.643	1.732.985.361.870	0,07
		2018	158.207.798.602	1.971.478.070.171	0,08
		2019	217.675.239.509	2.151.801.131.686	0,10
18	TOTO	2015	285.236.780.659	2.278.673.871.193	0,13

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
		2016	168.564.583.718	2.069.017.634.710	0,08
		2017	278.935.804.544	2.175.635.317.886	0,13
		2018	346.692.796.102	2.228.260.379.884	0,16
		2019	140.597.500.915	2.056.096.661.320	0,07
19	AKPI	2015	27.644.714	2.017.466.511	0,01
		2016	52.393.857	2.047.218.639	0,03
		2017	13.333.970	2.064.857.643	0,01
		2018	64.226.271	2.387.420.036	0,03
		2019	54.355.268	2.251.123.299	0,02
20	TALF	2015	33.717.725.980	476.383.633.793	0,07
		2016	30.137.707.324	569.419.992.907	0,05
		2017	21.465.836.784	646.087.885.410	0,03
		2018	43.976.734.000	741.055.147.778	0,06
		2019	27.456.246.966	924.654.057.926	0,03
21	EKAD	2015	47.040.256.456	531.537.606.573	0,09
		2016	90.685.821.530	568.638.832.579	0,16
		2017	76.195.665.729	643.591.823.505	0,12
		2018	74.045.187.763	739.578.860.399	0,10
		2019	77.402.572.552	758.299.364.555	0,10
22	INCI	2015	16.960.660.023	136.668.408.270	0,12
		2016	9.988.836.259	176.067.561.639	0,06
		2017	16.554.272.131	269.706.737.385	0,06

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
		2018	16.675.673.703	367.961.600.950	0,05
		2019	13.811.736.623	381.433.524.206	0,04
23	INAI	2015	28.615.673.167	1.384.675.922.166	0,02
		2016	35.552.975.244	1.284.510.320.664	0,03
		2017	38.651.704.520	980.285.748.450	0,04
		2018	40.463.141.352	1.130.297.518.656	0,04
		2019	33.558.115.185	1.216.136.763.334	0,03
24	LION	2015	46.018.637.487	389.251.192.409	0,12
		2016	42.345.417.055	379.137.149.036	0,11
		2017	9.282.943.009	349.690.796.141	0,03
		2018	14.679.673.993	424.128.420.727	0,03
		2019	926.463.199	372.489.022.928	0,00
25	CPIN	2015	1.832.598	29.920.628	0,06
		2016	2.225.402	38.256.857	0,06
		2017	2.499.875	49.367.386	0,05
		2018	4.551.485	53.957.604	0,08
		2019	3.632.174	58.634.502	0,06
26	AUTO	2015	322.701	11.723.787	0,03
		2016	483.421	12.806.867	0,04
		2017	547.781	13.549.857	0,04
		2018	680.801	15.356.381	0,04
		2019	816.971	15.444.775	0,05

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
27	INDS	2015	1.933.819.152	1.659.505.639.261	0,00
		2016	49.556.367.334	1.637.036.790.119	0,03
		2017	113.639.539.901	1.967.982.902.772	0,06
		2018	110.686.883.366	2.400.062.227.790	0,05
		2019	101.465.560.351	2.091.491.715.532	0,05
28	SMSM	2015	461.307	2.802.924	0,16
		2016	502.192	2.879.876	0,17
		2017	555.388	3.339.964	0,17
		2018	63.355	3.933.353	0,02
		2019	638.676	3.935.811	0,16
29	RICY	2015	13.465.713.464	1.111.051.293.008	0,01
		2016	14.033.426.519	1.221.519.096.811	0,01
		2017	16.558.562.698	1.600.432.168.098	0,01
		2018	18.480.376.458	2.107.868.384.272	0,01
		2019	17.219.044.542	2.151.323.988.585	0,01
30	STAR	2015	306.885.570	258.967.329.940	0,00
		2016	462.555.307	129.480.611.941	0,00
		2017	594.726.798	114.496.159.735	0,01
		2018	173.591.040	131.833.235.355	0,00
		2019	1.951.111.404	78.512.610.966	0,02
31	TRIS	2015	37.448.445.764	859.743.472.895	0,04
		2016	24.191.377.409	901.909.489.240	0,03

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
		2017	14.198.889.550	773.806.956.330	0,02
		2018	19.665.074.694	860.682.351.001	0,02
		2019	23.236.898.190	1.478.735.205.373	0,02
32	UNIT	2015	385.953.128	118.260.140.704	0,00
		2016	860.775.731	104.109.821.503	0,01
		2017	1.062.124.056	103.245.048.266	0,01
		2018	506.523.775	103.498.145.907	0,00
		2019	676.975.255	108.096.395.863	0,01
33	JECC	2015	2.464.669	1.663.335.876	0,00
		2016	132.423.161	2.037.784.842	0,06
		2017	83.355.370	2.184.518.893	0,04
		2018	88.428.879	3.207.579.964	0,03
		2019	102.517.868	2.926.098.892	0,04
34	KBLI	2015	115.371.098.970	2.662.038.531.021	0,04
		2016	334.338.838.592	2.812.196.217.447	0,12
		2017	358.974.051.474	3.186.704.707.526	0,11
		2018	235.651.063.203	4.239.937.390.001	0,06
		2019	394.950.161.188	4.500.555.248.155	0,09
35	KBLM	2015	12.760.365.612	967.710.339.797	0,01
		2016	21.245.022.916	987.409.109.474	0,02
		2017	43.994.949.645	1.215.476.677.995	0,04
		2018	40.675.096.628	1.243.465.775.218	0,03

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Penjualan	NPM
		2019	38.648.269.147	1.149.120.504.681	0,03
36	VOKS	2015	277.107.966	1.597.736.461.981	0,00
		2016	160.045.873.393	2.022.350.276.358	0,08
		2017	166.204.959.339	2.258.316.807.862	0,07
		2018	105.468.744.587	2.684.419.276.973	0,04
		2019	208.249.125.401	2.669.686.185.127	0,08
37	BATA	2015	129.519.446	1.028.850.578	0,13
		2016	42.231.663	999.802.379	0,04
		2017	53.654.376	974.536.083	0,06
		2018	67.944.867	992.696.071	0,07
		2019	23.441.338	931.271.436	0,03

Sumber : Data diolah, 2021

Current Ratio

Tahun 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
1	DLTA	2015	902.006.833	140.419.495	6,42
		2016	1.048.133.697	137.842.096	7,60
		2017	1.206.576.189	139.684.908	8,64
		2018	1.384.227.944	192.299.843	7,20
		2019	1.292.805.083	160.587.363	8,05
2	ICBP	2015	13.961.500	6.002.344	2,33
		2016	15.571.362	6.469.785	2,41
		2017	16.579.331	6.827.588	2,43
		2018	14.121.568	7.235.398	1,95
		2019	16.624.925	6.556.359	2,54
3	INDF	2015	42.816.745	25.107.538	1,71
		2016	28.985.443	19.219.441	1,51
		2017	32.948.131	21.637.763	1,52
		2018	33.272.618	31.204.102	1,07
		2019	31.403.445	24.686.862	1,27
4	MLBI	2015	709.955	1.215.227	0,58
		2016	901.258	1.326.261	0,68
		2017	1.076.845	1.304.114	0,83
		2018	1.228.961	1.578.919	0,78
		2019	1.162.802	1.588.693	0,73

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
5	ROTI	2015	812.990.646.097	395.920.006.814	2,05
		2016	949.414.338.057	320.501.824.382	2,96
		2017	2.319.937.439.019	1.027.176.531.240	2,26
		2018	1.876.409.299.238	525.422.150.049	3,57
		2019	1.874.411.044.438	1.106.938.318.565	1,69
6	ULTJ	2015	2.103.565.054.627	561.628.179.393	3,75
		2016	2.874.821.874.013	593.525.591.694	4,84
		2017	3.439.990	820.625	4,19
		2018	2.793.521	635.161	4,40
		2019	3.716.641	836.314	4,44
7	GGRM	2015	42.568.431	24.045.086	1,77
		2016	41.933.173	21.638.565	1,94
		2017	43.764.490	22.611.042	1,94
		2018	45.284.719	22.003.567	2,06
		2019	52.081.133	25.258.727	2,06
8	HMSP	2015	29.807.330	4.538.674	6,57
		2016	33.647.496	6.428.478	5,23
		2017	34.180.353	6.482.969	5,27
		2018	37.831.483	8.793.999	4,30
		2019	41.697.015	12.727.676	3,28
9	DVLA	2015	1.043.830.034	296.298.118	3,52
		2016	1.068.967.094	374.427.510	2,85

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
		2017	1.175.655.601	441.622.865	2,66
		2018	1.203.372.372	416.537.366	2,89
		2019	1.280.212.333	439.444.037	2,91
10	KAEF	2015	2.100.921.793.619	1.092.623.765.562	1,92
		2016	2.906.737.458.288	1.696.208.867.581	1,71
		2017	3.662.090.215.984	2.369.507.448.768	1,55
		2018	5.369.546.726.061	3.774.304.481.466	1,42
		2019	7.344.787.123	7.392.140.277	0,99
11	KLBF	2015	8.745.465.558.702	2.365.880.490.863	3,70
		2016	9.572.529.767.897	2.317.161.787.100	4,13
		2017	10.042.738.649.964	2.227.336.011.715	4,51
		2018	10.648.288.386.726	2.286.167.471.594	4,66
		2019	11.222.490.978.401	2.577.108.805.851	4,35
12	TSPC	2015	4.304.922.144.352	1.696.486.657.073	2,54
		2016	4.385.083.916.291	1.653.413.220.121	2,65
		2017	5.049.363.864.387	2.002.621.403.597	2,52
		2018	5.130.662.268.849	2.039.075.034.339	2,52
		2019	5.432.638.388.008	1.953.608.306.055	2,78
13	TCID	2015	1.112.672.539.416	222.930.621.643	4,99
		2016	1.174.482.404.487	223.305.151.868	5,26
		2017	1.276.478.591.542	259.806.845.843	4,91
		2018	1.333.428.311.186	231.533.842.787	5,76

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
		2019	1.428.191.709.308	255.852.750.863	5,58
14	UNVR	2015	6.623.114	10.127.542	0,65
		2016	6.588.109	10.878.074	0,61
		2017	7.941.635	12.532.304	0,63
		2018	8.325.029	11.134.786	0,75
		2019	8.530.334	13.065.308	0,65
15	CINT	2015	204.898.872.797	58.865.969.544	3,48
		2016	195.009.437.765	61.704.877.496	3,16
		2017	210.584.866.561	66.014.779.104	3,19
		2018	219.577.845.340	81.075.913.501	2,71
		2019	250.724.734.274	105.476.752.401	2,38
16	WTON	2015	2.454.908.917.917	1.793.464.704.364	1,37
		2016	2.439.936.919.731	1.863.793.637.439	1,31
		2017	4.351.377.174.399	4.216.314.368.711	1,03
		2018	5.870.714.397.037	5.248.086.459.534	1,12
		2019	7.168.912.545.835	6.195.054.960.778	1,16
17	ARNA	2015	509.178.006.986	498.857.920.866	1,02
		2016	642.892.045.913	476.631.150.852	1,35
		2017	740.190.524.246	455.152.838.360	1,63
		2018	827.587.984.112	476.647.908.156	1,74
		2019	975.855.222.731	562.004.316.020	1,74
18	TOTO	2015	1.348.062.605.364	560.119.357.447	2,41

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
		2016	1.290.208.433.386	589.149.809.544	2,19
		2017	1.316.631.634.008	573.582.902.438	2,30
		2018	1.339.048.037.127	453.374.610.070	2,95
		2019	1.339.772.262.004	366.190.601.907	3,66
19	AKPI	2015	1.015.820.277	985.625.515	1,03
		2016	870.146.141	770.887.902	1,13
		2017	1.003.030.428	961.284.302	1,04
		2018	1.233.718.090	1.215.369.846	1,02
		2019	1.087.597.237	1.003.137.696	1,08
20	TALF	2015	306.262.234.760	69.980.726.732	4,38
		2016	325.494.162.443	111.360.300.869	2,92
		2017	351.255.636.607	127.673.269.661	2,75
		2018	405.988.723.901	151.341.881.953	2,68
		2019	468.877.107.644	173.578.114.300	2,70
21	EKAD	2015	284.055.202.739	79.594.446.891	3,57
		2016	337.644.083.636	69.110.450.442	4,89
		2017	417.271.766.887	91.524.721.725	4,56
		2018	465.208.782.562	91.381.683.504	5,09
		2019	486.522.278.448	70.337.529.585	6,92
22	INCI	2015	107.268.622.816	11.084.537.386	9,68
		2016	118.743.367.562	20.420.038.273	5,82
		2017	145.540.638.781	28.527.518.002	5,10

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
		2018	191.492.982.970	63.071.077.029	3,04
		2019	203.255.907.233	56.103.890.638	3,62
23	INAI	2015	955.465.955.552	952.130.242.797	1,00
		2016	974.282.450.341	971.422.099.001	1,00
		2017	860.749.259.575	867.251.288.494	0,99
		2018	1.053.375.131.067	1.029.377.481.187	1,02
		2019	883.710.927.664	819.488.911.354	1,08
24	LION	2015	508.345.199.844	133.693.524.978	3,80
		2016	542.813.854.009	152.533.565.561	3,56
		2017	503.156.333.673	153.806.819.548	3,27
		2018	516.186.639.128	146.900.045.005	3,51
		2019	503.134.003.908	131.795.209.943	3,82
25	CPIN	2015	12.058.873	5.703.841	2,11
		2016	12.059.433	5.550.257	2,17
		2017	11.730.468	5.059.551	2,32
		2018	14.097.959	4.732.868	2,98
		2019	13.297.718	5.188.281	2,56
26	AUTO	2015	4.796.770	3.625.907	1,32
		2016	4.903.902	3.258.146	1,51
		2017	5.228.541	3.041.502	1,72
		2018	6.013.683	4.066.699	1,48
		2019	5.544.549	3.438.999	1,61

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
27	INDS	2015	992.929.224.058	445.006.853.182	2,23
		2016	981.694.103.645	323.699.362.103	3,03
		2017	1.044.177.985.635	203.724.817.070	5,13
		2018	1.134.664.034.610	217.729.909.744	5,21
		2019	959.368.453.499	164.608.081.444	5,83
28	SMSM	2015	1.368.558	571.712	2,39
		2016	1.454.387	508.482	2,86
		2017	1.570.110	419.913	3,74
		2018	1.853.782	470.116	3,94
		2019	2.138.324	461.192	4,64
29	RICY	2015	851.477.572.604	718.198.051.081	1,19
		2016	943.936.823.539	821.755.111.705	1,15
		2017	1.037.820.994.280	873.224.844.013	1,19
		2018	1.211.372.836.329	994.288.048.839	1,22
		2019	1.311.243.383.701	1.040.814.841.742	1,26
30	STAR	2015	412.696.940.471	228.149.112.195	1,81
		2016	386.235.136.503	193.182.418.174	2,00
		2017	321.284.372.984	115.972.411.559	2,77
		2018	332.864.525.071	115.834.635.089	2,87
		2019	579.106.848.960	89.743.087.070	6,45
31	TRIS	2015	428.277.334.914	226.897.001.062	1,89
		2016	462.578.104.758	281.765.921.952	1,64

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
		2017	356.846.493.425	185.606.885.071	1,92
		2018	439.825.803.141	273.186.011.900	1,61
		2019	757.558.426.474	416.684.073.265	1,82
32	UNIT	2015	127.287.422.486	213.482.744.910	0,60
		2016	119.703.443.512	184.553.791.534	0,65
		2017	132.822.954.660	179.729.679.061	0,74
		2018	145.765.932.001	172.205.936.808	0,85
		2019	163.446.475.688	169.203.190.836	0,97
33	JECC	2015	927.492.569	883.284.008	1,05
		2016	1.131.735.197	992.544.784	1,14
		2017	1.294.457.697	1.220.226.620	1,06
		2018	1.415.578.044	1.288.252.935	1,10
		2019	1.287.480.241	1.028.264.298	1,25
34	KBLI	2015	961.562.673.606	337.673.717.786	2,85
		2016	1.223.453.184.817	358.715.994.083	3,41
		2017	1.843.100.256.808	933.490.170.009	1,97
		2018	2.173.538.859.435	882.122.694.126	2,46
		2019	2.558.063.940.045	879.315.149.074	2,91
35	KBLM	2015	362.277.745.626	342.643.691.341	1,06
		2016	394.738.153.988	303.264.273.023	1,30
		2017	548.840.102.130	434.423.462.965	1,26
		2018	604.353.216.583	463.589.374.916	1,30

No	Kode Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
		2019	575.917.900.166	422.310.102.458	1,36
36	VOKS	2015	1.151.962.694.102	986.156.352.701	1,17
		2016	1.291.317.191.672	968.322.757.177	1,33
		2017	1.667.656.034.897	1.260.868.218.485	1,32
		2018	1.905.388.216.804	1.497.401.925.999	1,27
		2019	2.280.902.024.124	1.284.816.720.522	1,78
37	BATA	2015	521.210.881	210.931.517	2,47
		2016	533.900.133	207.734.690	2,57
		2017	567.954.415	230.497.528	2,46
		2018	569.545.551	194.538.478	2,93
		2019	544.652.375	164.585.862	3,31

Sumber : Data diolah, 2021

Lampiran 4 : Data Variabel

No	Kode Perusahaan	Tahun	DAR (X1)	DER (X2)	NPM (X3)	CR (X4)	ETR (Y)
1	DLTA	2015	0,18	0,22	0,12	6,42	0,23
		2016	0,15	0,18	0,15	7,60	0,22
		2017	0,15	0,17	0,36	8,64	0,24
		2018	0,16	0,19	0,38	7,20	0,23
		2019	0,15	0,18	0,38	8,05	0,23
2	ICBP	2015	0,38	0,62	0,09	2,33	0,27
		2016	0,36	0,56	0,11	2,41	0,27
		2017	0,36	0,56	0,10	2,43	0,32
		2018	0,34	0,51	0,12	1,95	0,28
		2019	0,31	0,45	0,13	2,54	0,28
3	INDF	2015	0,53	1,13	0,06	1,71	0,51
		2016	0,47	0,87	0,08	1,51	0,34
		2017	0,47	0,88	0,07	1,52	0,33
		2018	0,48	0,93	0,07	1,07	0,33
		2019	0,44	0,77	0,08	1,27	0,33
4	MLBI	2015	0,64	1,74	0,19	0,58	0,26
		2016	0,64	1,77	0,03	0,68	0,26
		2017	0,58	1,36	0,39	0,83	0,26
		2018	0,60	1,47	0,34	0,78	0,27
		2019	0,60	1,53	0,32	0,73	0,26
5	ROTI	2015	0,56	1,28	0,12	2,05	0,28
		2016	0,51	1,02	0,11	2,96	0,24
		2017	0,38	0,62	0,05	2,26	0,27
		2018	0,34	0,51	0,05	3,57	0,32
		2019	0,34	0,51	0,07	1,69	0,32
6	ULTJ	2015	0,21	0,27	0,12	3,75	0,25
		2016	0,18	0,21	0,15	4,84	0,24
		2017	0,19	0,23	0,15	4,19	0,31
		2018	0,14	0,16	0,13	4,40	0,26
		2019	0,14	0,17	0,17	4,44	0,25
7	GGRM	2015	0,40	0,67	0,14	1,77	0,25

No	Kode Perusahaan	Tahun	DAR (X1)	DER (X2)	NPM (X3)	CR (X4)	ETR (Y)
		2016	0,37	0,59	0,13	1,94	0,25
		2017	0,37	0,58	0,09	1,94	0,26
		2018	0,35	0,53	0,08	2,06	0,26
		2019	0,35	0,54	0,10	2,06	0,25
8	HMSP	2015	0,16	0,19	0,12	6,57	0,26
		2016	0,20	0,24	0,13	5,23	0,25
		2017	0,21	0,26	0,13	5,27	0,25
		2018	0,24	0,32	0,13	4,30	0,25
		2019	0,30	0,43	0,13	3,28	0,25
9	DVLA	2015	0,29	0,41	0,08	3,52	0,25
		2016	0,30	0,42	0,10	2,85	0,29
		2017	0,32	0,47	0,10	2,66	0,28
		2018	0,29	0,40	0,12	2,89	0,26
		2019	0,29	0,40	0,12	2,91	0,26
10	KAEF	2015	0,40	0,67	0,05	1,92	0,03
		2016	0,51	1,03	0,05	1,71	0,29
		2017	0,58	1,37	0,05	1,55	0,26
		2018	0,65	1,82	0,05	1,42	0,30
		2019	0,60	1,48	0,00	0,99	0,59
11	KLBF	2015	0,20	0,25	0,12	3,70	0,24
		2016	0,18	0,22	0,12	4,13	0,24
		2017	0,16	0,20	0,12	4,51	0,24
		2018	0,16	0,19	0,12	4,66	0,24
		2019	0,18	0,21	0,11	4,35	0,25
12	TSPC	2015	0,31	0,45	0,06	2,54	0,25
		2016	0,30	0,42	0,06	2,65	0,24
		2017	0,32	0,46	0,06	2,52	0,25
		2018	0,31	0,45	0,05	2,52	0,26
		2019	0,31	0,45	0,05	2,78	0,25
13	TCID	2015	0,18	0,21	0,24	4,99	0,07
		2016	0,18	0,23	0,06	5,26	0,27
		2017	0,21	0,27	0,07	4,91	0,26
		2018	0,19	0,24	0,07	5,76	0,26
		2019	0,21	0,26	0,05	5,58	0,28

No	Kode Perusahaan	Tahun	DAR (X1)	DER (X2)	NPM (X3)	CR (X4)	ETR (Y)
14	UNVR	2015	0,71	2,26	0,16	0,65	0,25
		2016	0,72	2,56	0,16	0,61	0,25
		2017	0,73	2,65	0,17	0,63	0,25
		2018	0,61	1,58	0,22	0,75	0,25
		2019	0,74	2,91	0,17	0,65	0,25
15	CINT	2015	0,18	0,21	0,09	3,48	0,28
		2016	0,18	0,22	0,06	3,16	0,27
		2017	0,20	0,25	0,08	3,19	0,23
		2018	0,21	0,26	0,04	2,71	0,39
		2019	0,25	0,34	0,02	2,38	0,48
16	WTON	2015	0,49	0,97	0,06	1,37	0,14
		2016	0,47	0,87	0,08	1,31	0,17
		2017	0,61	1,57	0,06	1,03	0,19
		2018	0,65	1,83	0,07	1,12	0,21
		2019	0,66	1,95	0,07	1,16	0,18
17	ARNA	2015	0,37	0,60	0,06	1,02	0,25
		2016	0,39	0,63	0,06	1,35	0,26
		2017	0,36	0,56	0,07	1,63	0,26
		2018	0,34	0,51	0,08	1,74	0,25
		2019	0,35	0,53	0,10	1,74	0,25
18	TOTO	2015	0,39	0,64	0,13	2,41	0,25
		2016	0,41	0,69	0,08	2,19	0,33
		2017	0,40	0,67	0,13	2,30	0,26
		2018	0,33	0,50	0,16	2,95	0,23
		2019	0,34	0,52	0,07	3,66	0,24
19	AKPI	2015	0,62	1,60	0,01	1,03	0,46
		2016	0,57	1,34	0,03	1,13	0,31
		2017	0,59	1,44	0,01	1,04	0,58
		2018	0,60	1,49	0,03	1,02	0,30
		2019	0,55	1,23	0,02	1,08	0,31
20	TALF	2015	0,19	0,24	0,07	4,38	0,23
		2016	0,15	0,17	0,05	2,92	0,27
		2017	0,17	0,20	0,03	2,75	0,33
		2018	0,18	0,22	0,06	2,68	0,28

No	Kode Perusahaan	Tahun	DAR (X1)	DER (X2)	NPM (X3)	CR (X4)	ETR (Y)
		2019	0,24	0,32	0,03	2,70	0,31
21	EKAD	2015	0,25	0,33	0,09	3,57	0,29
		2016	0,16	0,19	0,16	4,89	0,23
		2017	0,17	0,20	0,12	4,56	0,26
		2018	0,15	0,18	0,10	5,09	0,27
		2019	0,12	0,14	0,10	6,92	0,31
22	INCI	2015	0,09	0,10	0,12	9,68	0,12
		2016	0,10	0,11	0,06	5,82	0,25
		2017	0,12	0,13	0,06	5,10	0,25
		2018	0,18	0,22	0,05	3,04	0,24
		2019	0,16	0,19	0,04	3,62	0,23
23	INAI	2015	0,82	4,55	0,02	1,00	0,50
		2016	0,81	4,19	0,03	1,00	0,39
		2017	0,77	3,38	0,04	0,99	0,26
		2018	0,78	3,61	0,04	1,02	0,38
		2019	0,74	2,80	0,03	1,08	0,30
24	LION	2015	0,29	0,41	0,12	3,80	0,21
		2016	0,31	0,46	0,11	3,56	0,23
		2017	0,34	0,51	0,03	3,27	0,54
		2018	0,32	0,47	0,03	3,51	0,39
		2019	0,32	0,47	0,00	3,82	0,84
25	CPIN	2015	0,49	0,95	0,06	2,11	0,20
		2016	0,42	0,71	0,06	2,17	0,44
		2017	0,36	0,56	0,05	2,32	0,23
		2018	0,30	0,43	0,08	2,98	0,23
		2019	0,28	0,39	0,06	2,56	0,21
26	AUTO	2015	0,29	0,41	0,03	1,32	0,26
		2016	0,28	0,39	0,04	1,51	0,26
		2017	0,27	0,37	0,04	1,72	0,23
		2018	0,29	0,41	0,04	1,48	0,21
		2019	0,27	0,37	0,05	1,61	0,24
27	INDS	2015	0,25	0,33	0,00	2,23	0,53
		2016	0,17	0,20	0,03	3,03	0,18
		2017	0,12	0,14	0,06	5,13	0,29

No	Kode Perusahaan	Tahun	DAR (X1)	DER (X2)	NPM (X3)	CR (X4)	ETR (Y)
		2018	0,12	0,13	0,05	5,21	0,25
		2019	0,09	0,10	0,05	5,83	0,22
28	SMSM	2015	0,35	0,54	0,16	2,39	0,21
		2016	0,30	0,43	0,17	2,86	0,24
		2017	0,25	0,34	0,17	3,74	0,02
		2018	0,23	0,30	0,02	3,94	0,24
		2019	0,21	0,27	0,16	4,64	0,22
29	RICY	2015	0,67	1,99	0,01	1,19	0,40
		2016	0,68	2,12	0,01	1,15	0,40
		2017	0,69	2,19	0,01	1,19	0,36
		2018	0,71	2,46	0,01	1,22	0,38
		2019	0,72	2,54	0,01	1,26	0,40
30	STAR	2015	0,33	0,49	0,00	1,81	0,88
		2016	0,29	0,41	0,00	2,00	0,92
		2017	0,20	0,25	0,01	2,77	0,88
		2018	0,20	0,25	0,00	2,87	0,97
		2019	0,15	0,18	0,02	6,45	0,71
31	TRIS	2015	0,43	0,74	0,04	1,89	0,25
		2016	0,46	0,85	0,03	1,64	0,47
		2017	0,35	0,53	0,02	1,92	0,35
		2018	0,44	0,78	0,02	1,61	0,19
		2019	0,42	0,74	0,02	1,82	0,49
32	UNIT	2015	0,47	0,90	0,00	0,60	0,77
		2016	0,44	0,77	0,01	0,65	0,55
		2017	0,42	0,74	0,01	0,74	0,31
		2018	0,41	0,71	0,00	0,85	0,33
		2019	0,41	0,69	0,01	0,97	0,22
33	JECC	2015	0,73	2,69	0,00	1,05	0,71
		2016	0,70	2,37	0,06	1,14	0,25
		2017	0,72	2,52	0,04	1,06	0,25
		2018	0,71	2,42	0,03	1,10	0,28
		2019	0,60	1,50	0,04	1,25	0,29
34	KBLI	2015	0,34	0,51	0,04	2,85	0,23
		2016	0,29	0,42	0,12	3,41	0,13

No	Kode Perusahaan	Tahun	DAR (X1)	DER (X2)	NPM (X3)	CR (X4)	ETR (Y)
		2017	0,41	0,69	0,11	1,97	0,16
		2018	0,37	0,60	0,06	2,46	0,24
		2019	0,33	0,49	0,09	2,91	0,21
35	KBLM	2015	0,55	1,21	0,01	1,06	0,41
		2016	0,50	0,99	0,02	1,30	0,43
		2017	0,36	0,56	0,04	1,26	0,01
		2018	0,37	0,58	0,03	1,30	0,37
		2019	0,34	0,51	0,03	1,36	0,21
36	VOKS	2015	0,67	2,01	0,00	1,17	0,88
		2016	0,60	1,49	0,08	1,33	0,29
		2017	0,61	1,59	0,07	1,32	0,28
		2018	0,63	1,69	0,04	1,27	0,26
		2019	0,63	1,73	0,08	1,78	0,20
37	BATA	2015	0,31	0,45	0,13	2,47	0,09
		2016	0,31	0,44	0,04	2,57	0,35
		2017	0,32	0,48	0,06	2,46	0,33
		2018	0,27	0,38	0,07	2,93	0,27
		2019	0,24	0,32	0,03	3,31	0,35

Sumber : Data diolah, 2021

Lampiran 5 : Hasil Output SPSS

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAR	185	,55	,95	,7650	,09849
DER	185	,10	4,55	,8233	,81063
NPM	185	,00	,39	,0812	,07113
CURRENT RATIO	185	,58	9,68	2,6639	1,73116
ETR	185	,01	,97	,3041	,15139
Valid N (listwise)	185				

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

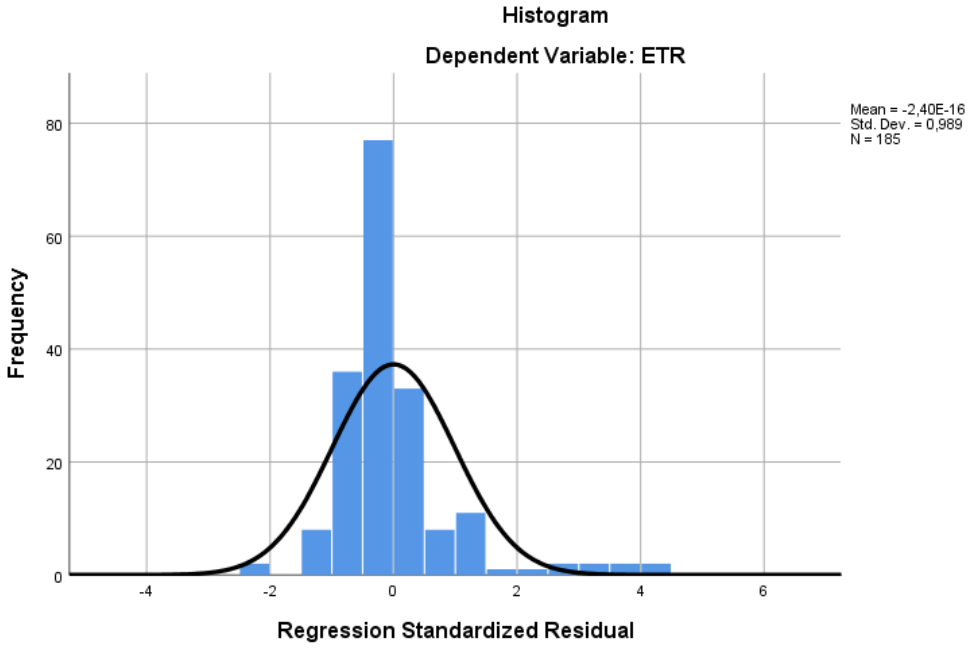

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot

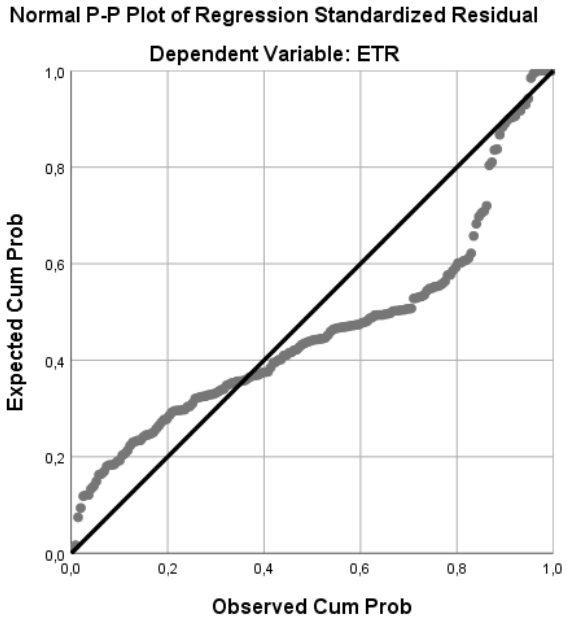

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DAR	,107	9,353
	DER	,234	4,280
	NPM	,817	1,224
	CURRENT RATIO	,222	4,508
a. Dependent Variable: ETR			

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplots

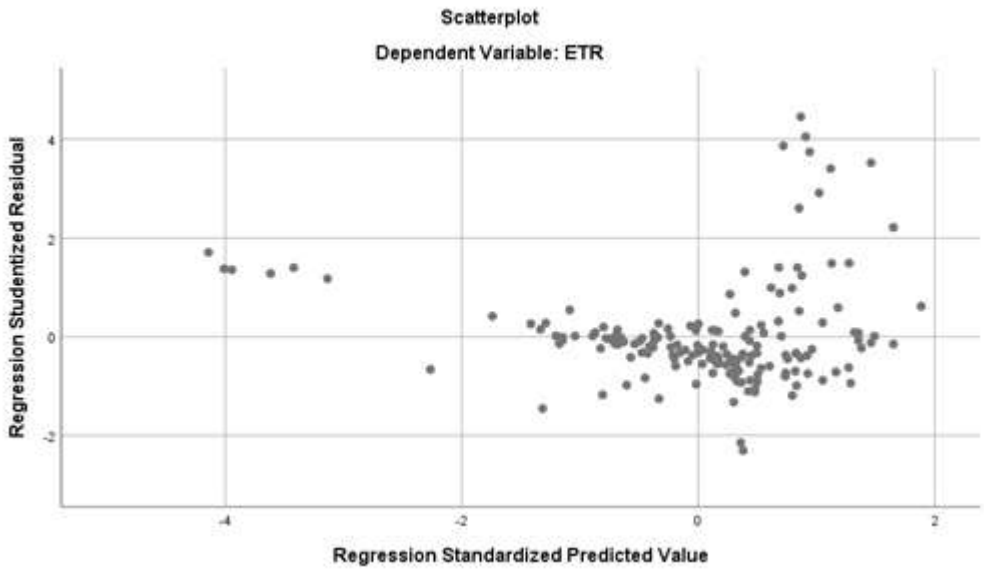

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji Autokorelasi dengan *Durbin Watson*

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,530[a]	,281	,260	,13046	2,048
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, DER, NPM, CURRENT RATIO, DAR					
b. Dependent Variable: ETR					

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,284	,251		1,128	,261
	DAR	,081	,318	,053	,254	,800
	DER	,016	,026	,088	,626	,532
	NPM	-,872	,159	-,410	-5,470	,000
	CURRENT RATIO	,006	,013	,069	,478	,634
a. Dependent Variable: ETR						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,419[a]	,175	,157	,13900
a. Predictors: (Constant), CURRENT RATIO, NPM, DER, DAR				

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji F Statistik

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,739	4	,185	9,565	,000[b]
	Residual	3,478	180	,019		
	Total	4,217	184			
a. Dependent Variable: ETR						
b. Predictors: (Constant), CURRENT RATIO, NPM, DER, DAR						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Uji T Statistik

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,316	,138		2,292	,023
	DAR	,051	,223	,051	,227	,821
	DER	,016	,030	,086	,540	,590
	NPM	-,871	,159	-,409	-5,463	,000
	CURRENT RATIO	,006	,012	,065	,460	,646
a. Dependent Variable: ETR						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2021

Lampiran 6 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama	: Annida Izzatul Islamiyah
Tempat, Tanggal Lahir	: Majalengka, 08 November 1997
Alamat Asal	: Blok Sabtu, RT 003/RW 006, Desa Garawastu Kec. Sindang, Kab Majalengka, Jawa Barat
No HP	: 082121413411
Email	: annidaislamiyah28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004 – 2010	: SD Negeri Garawastu I
2010 – 2013	: MTS Al-Ishlah Bobos, Cirebon
2013 – 2016	: SMA Negeri 1 Majalengka
2017 – Sekarang	: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Formal

2017 – 2018	: Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly
2017 – 2018	: Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2018 – 2019	: English Language Center (ELC) UIN Malang

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan akuntansi periode 2018-2019 dan 2019-2020

Lampiran 7: Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Annida Izzatul Islamiyah
NIM/Jurusan : 17520100/ Akuntansi
Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA
Judul Skripsi : Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14 Novempeber 2020	Pengajuan *Outline*	1.
2.	20 Februari 2021	Proposal	2.
3.	23 Agustus 2021	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	03 September 2021	Seminar Proposal	4.
5.	20 September 2021	Acc proposal	5.
6.	19 November 2021	Skripsi BAB I-V	6.
7.	05 Desember 2021	Revisi & Acc Skripsi	7.
8.	10 Desember 2021	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 10 Desember 2021

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D.
NIP. 197606172008012020